

SKRIPSI

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PENANGANAN ANAK JALANAN DI DINAS SOSIAL KOTA MAKASSAR

RIZCAH AMELIA

E21111101



**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2015**



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM SARJANA

ABSTRAK

RIZCAH AMELIA (E21111101), Efektivitas Pelaksanaan Program Penanganan Anak Jalanan Di Dinas Sosial Kota Makassar .xiv + 94 halaman + 1 gambar + 2 tabel + 20 kepustakaan (1986- 2010) + 3 lampiran

Skripsi ini membahas efektivitas program penanganan anak jalanan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Makassar. Efektivitas program penanganan ini menggunakan teori dari Budiani dengan menggunakan empat indikator efektivitas program yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program. Skripsi ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan di dukung dengan data sekunder. Dengan menggunakan observasi langsung dan wawancara terhadap informan yaitu dari dinas sosial selaku kepala bidang rehabilitas sosial, kepala seksi penanganan anak jalanan, staff-staff rehabilitas sosial dan informan kedua yaitu anak jalanan, dan orang tua anak jalanan. Teknik analisis data dimulai dari pengumpulan informasi melalui wawancara dan pada tahap akhir dengan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum cukup efektifnya program penanganan anak jalanan di dinas sosial kota Makassar, dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Dinas Sosial kota Makassar dalam menangani anak jalanan. Salah satunya masalah sosialisasi kepada masyarakat tentang program penanganan anak jalanan.

Selain itu dalam skripsi ini juga membahas faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penanganan anak jalanan di Makassar. Beberapa faktor pendukung yang ada adalah Tersedianya Regulasi (Peraturan Daerah No.2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan) sebagai dasar hukum dalam meminimalisir jumlah anak jalanan dengan baik, Tersedianya sumber daya yang memadai untuk membina anak jalanan di Kota Makassar, dan anggaran yang memadai. Sedangkan untuk faktor penghambat yaitu ada Modernisasi, Industrialisasi, Urbanisasi, kemiskinan, dan kondisi sosial.

Kata Kunci: Efektivitas, Program, Anak Jalanan.



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM SARJANA

ABSTRACT

RIZCAH AMELIA (E21111101), Effectiveness of Management Programme for Street Children in Social Service Makassar .xiv + 94 pages + 2 + 1 pictures table + 20 literature (1998- 2014) + 3 attachments

This scripction discusses the effectiveness of the handling of street children program implemented by the Social Service of Makassar. The effectiveness of this treatment program uses the theory of Budiani by using four indicators of the effectiveness of the program that is appropriate targeting, socialization program, the purpose of the program, and program monitoring. This scripction uses qualitative and descriptive approach is supported by secondary data. By using direct observation and interviews with informants, namely of social services as head of social rehabilitation, section chief handling street children, social rehabilitation staffs and second informant ie street children, street children and the elderly. Data analysis techniques starting from collecting information through interviews and at the final stage with interesting conclusions.

Result observationing to point out that was enough effective strett child handle program at on duty Makassar's city social, of this research result point out that extant a few things which shall at looking at by on duty Makassar's city Social in handle street child.

Also in this scripction also discusses the factors supporting and inhibiting the handling of street children in Makassar. That there are several contributing factors is the availability of the Regulation (the norm of Region 2 of 2008 on Street Children Development) as a legal basis in minimizing the number of street children well, availability of adequate resources to foster street children in Makassar, and budget adequate. As for inhibiting factor is that there Modernization, industrialization, urbanization, poverty, and social conditions.

Keywords: Effectiveness, Programs, Street Children.



**UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM SARJANA**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **RIZCAH AMELIA**

NPM : **E211 11 101**

Program Studi : **Ilmu Administrasi Negara**

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PENANGANAN ANAK JALANAN DI DINAS SOSIAL KOTA MAKASSAR** benar-benar merupakan hasil karya pribadi dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Makassar, Mei 2015

Yang Membuat Pernyataan,



**RIZCAH AMELIA
NIM. E211 11 101**



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

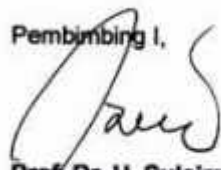
Nama : RIZCAH AMELIA
NIM : E211 11 101
Program Studi : Administrasi Negara
Judul Penelitian : Efektivitas Pelaksanaan Program Penanganan Anak Jalanan Di Dinas Sosial Kota Makassar

Telah diperiksa oleh Ketua Program Studi Administrasi Negara dan Pembimbing serta dinyatakan layak untuk diajukan ke Sidang Skripsi Program Studi Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, Mei 2015

Menyetujui :

Pembimbing I,


Prof. Dr. H. Sulaiman Asang, MS
Nip.19610108 198702 1 001

Pembimbing II,


Dr. Atta Irene Allorante, M.Si
Nip. 19610504 198811 2 001

Mengetahui :

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi,



Dr. H. Hasniati, M.Si
Nip. 196801011997022001



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Penulis : RIZCAH AMELIA
NIM : E21111101
Program Studi : ADMINISTRASI NEGARA
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM
PENANGANAN ANAK JALANAN DI DINAS SOSIAL
KOTA MAKASSAR

Telah dipertahankan dihadapan sidang Penguji Skripsi Studi Administrasi Negara
Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Hasanuddin, pada Hari Rabu Tanggal 03 Juni 2015

Dewan Penguji Skripsi,

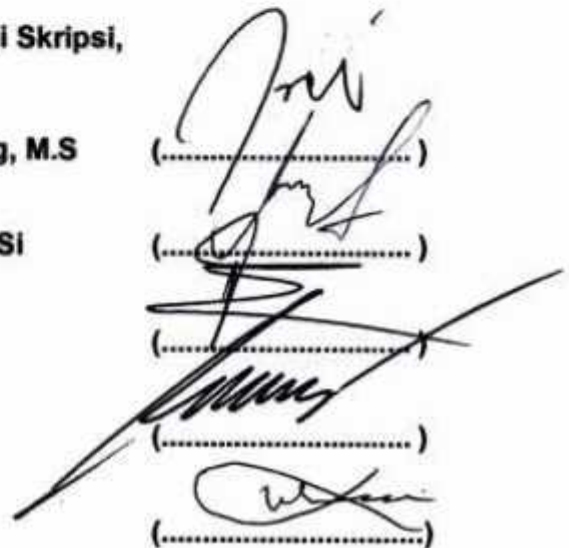
Ketua : Prof. Dr. H. Sulaiman Asang, M.S

Sekretaris : Dr. Atta Irene Allorante, M. Si

Anggota : Dr. H. Baharuddin, M.Si

Drs. La Tamba, M.Si

Drs. Nelman Edy, M.Si



(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, dan hidayah-Nya penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PENANGANAN ANAK JALANAN DI DINAS SOSIAL KOTA MAKASSAR”. Shalawat serta salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang membawa manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki. Untuk itu demi sempurnanya skripsi ini, penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran yang berupa kritik dan saran yang bersifat konstruktif.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua Ayahanda **Beddu Solo** dan Ibunda **Hj. Suleha**. Terima kasih karena tulus ikhlas memberikan kasih sayang, cinta, do'a, perhatian, dukungan moral, dan materi yang telah diberikan selama ini. Terima kasih telah meluangkan segenap waktunya untuk mengasuh, mendidik, membimbing, dan mengiringi perjalanan hidup dengan dibarengi alunan do'a yang tiada henti agar penulis sukses dalam menggapai cita-cita.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA** sebagai rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak **Prof. Alimuddin Unde, M.Si** sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta para staf dan jajarannya.
3. Ibu **Dr. Hj. Hasniati, M.Si** selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara dan Bapak **Drs. Nelman Edy, M.Si** selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara.
4. Bapak **Prof. Dr. H. Sulaiman Asang, M.S** dan Ibu **Dr. Atta Irene Allorante, M.Si** selaku pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis.
5. Bapak **Dr. H. Baharuddin, M.Si, Drs. La Tamba, M.Si** dan Bapak **Drs. Nelman Edy, M.Si** selaku tim penguji. Terima kasih atas waktu, masukan, dan arahnya.
6. Bapak **Dr. Muhammad Rusdi, M.Si** selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan dan masukan selama proses perkuliahan penulis.
7. Para dosen jurusan Ilmu Administrasi FISIP UNHAS terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun. Juga kepada Kak **Ina, Kak Aci, Ibu Anni, Bu Ros** dan **Pak Lili** yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan kelengkapan surat-surat selama penulisan skripsi.
8. Seluruh **pegawai Dinas Sosial Kota Makassar** atas bantuan dan kesediaan meluangkan waktunya untuk penulis dalam proses penelitian.

9. Para **JAMES (Amma, Anti, Fate, Firus, Dian, Ipeh dan Sita)** terima kasih karena sudah menjadi teman yang tidak pernah absen dalam suka dan duka penulis. Menjadi salah satu obat penyemangat penulis, termasuk dalam mengerjakan skripsi ini.
10. Sepupuku sekaligus sahabatku **Ika Saputri** terima kasih telah menjadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman **BRILIAN 2011** (Bright Leader of Administration) yang tidak dapat dituliskan satu persatu terima kasih atas segala bantuan dan perhatian kalian selama proses perkuliahan di kampus ini, semoga kebersamaan yang terjalin selama ini tetap ada dan semoga harapan, cita-cita kita bersama dapat tercapai. Amin.
12. **Keluarga besar penulis** tanpa terkecuali yang telah mendukung dan mendoakan selama ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan masukan bagi pembaca.

Terima Kasih, Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, Juni 2015

Rizcah Amelia

DAFTAR ISI

	halaman
Halaman Judul	i
Abstrak	ii
Abstract	iii
Lembar Pernyataan Keaslian	iv
Lembar Persetujuan Skripsi	v
Lembar Pengesahan Skripsi	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	x
Daftar Gambar	xii
Daftar Tabel	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
I.1 Latar Belakang Masalah	1
I.2 Rumusan Masalah	6
I.3 Tujuan Penelitian	7
I.4 Manfaat Penelitian	7
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 9
II.1 Efektivitas	9
II.1.1 Konsep Efektivitas	9
II.1.2 Pendekatan Efektivitas	13
II.1.3 Indikator Efektivitas	14
II.1.4 Efektivitas Program	17
II.2 Konsep Program	18
II.3 Anak Jalanan	20
II.3.1 Karakteristik Anak Jalanan	22
II.3.2 Penyebab anak menjadi Anak Jalanan	26
II.3.3 Dampak dari Anak Jalanan	29
II.4 Program Penanganan Anak Jalanan	30
II.4.1 Pendekatan yang digunakan dalam penanganan Anak Jalanan	32
II.5 Kerangka Pikir	33

BAB III METODE PENELITIAN	37
III.1 Metode Penelitian.....	37
III.2 Penelitian Kualitatif.....	37
III.3 Lokasi Penelitian	38
III.4 Tipe dan Dasar Penelitian	38
III.5 Informan Penelitian	38
III.6 Teknik Pengumpulan Data	39
III.7 Sumber Data dalam Penelitian.....	41
III.8 Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN	43
IV.1 Deskripsi Lokasi Penelitian	43
IV.1.1 Sejarah Singkat Dinas Sosial Kota Makassar	43
IV.2 Visi, Misi, dan Tujuan.....	44
IV.3 Struktur Organisasi	45
IV.4 Tugas Pokok.....	47
IV.5 Bidang Kewenangan Dinas Sosial	49
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	57
V.1 Perkembangan Anak Jalanan di Makassar	58
V.2 Penanganan Anak Jalanan oleh Dinas Sosial Kota Makassar	60
V.3 Efektivitas Pelaksanaan Program Penanganan Anak Jalanan Dinas Sosial Kota Makassar	65
V.4 Faktor Pendukung Program Penanganan Anak Jalanan	83
V.5 Faktor Penghambat Program Penanganan Anak Jalanan	85
BAB VI PENUTUP	89
VI.1 Kesimpulan	89
VI.2 Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN	94

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar II.1 Kerangka Pikir	36
Gambar V.1 Pembinaan Pencegahan	64

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel V.1 Perkembangan Jumlah Anak Jalanan dan Gelandangan di Kota Makassar	59
Tabel V.2 Jumlah Anak Jalanan yang Menerima Paket Bantuan	79

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kemampuan aparat dalam merumuskan program atau kebijakan untuk dilaksanakan oleh aparat pemerintah dalam kelompok-kelompok masyarakat yang ikut serta bersama-sama melaksanakan program yang telah diputuskan yang harusnya didukung atau ditunjang oleh sarana dan prasarana yang ada.

Negara berkembang seperti Indonesia, secara berkelanjutan melakukan pembangunan, baik secara fisik maupun mental untuk mencapai tujuan Negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Agar tujuan Negara dapat terlaksana dibutuhkan sumber daya manusia yang mampu melaksanakannya dengan baik, sehingga perlu dipersiapkan sejak dini. Maka dari itu perkembangan anak telah menjadi perhatian yang penting. Mulai dari usia dini anak perlu dididik agar kelak mampu bersaing dengan dunia internasional.

Anak adalah investasi dan harapan masa depan bangsa serta sebagai penerus generasi di masa mendatang. Dalam siklus kehidupan masa anak-anak merupakan fase dimana anak mengalami tumbuh kembang yang menentukan masa depannya. Perlu adanya optimalisasi perkembangan anak, karena selain krusial juga pada masa itu anak membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua atau keluarga sehingga secara mendasar hak dan kebutuhan anak dapat terpenuhi

secara baik. Anak seyogyanya dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, bahagia, bermoral tinggi dan terpuji.

Sampai saat ini bangsa Indonesia masih diperhadapkan dengan masalah anak-anak. Fenomena yang perlu mendapat perhatian saat ini adalah maraknya anak-anak jalanan. Meningkatnya angka penduduk miskin telah mendorong meningkatnya angka anak putus sekolah dan meningkatnya anak-anak jalanan. Pada umumnya anak-anak jalanan mengalami masalah ganda seperti kesulitan ekonomi, menderita gizi buruk, kurang perhatian dan kasih sayang orang tua, tidak bisa mendapat layanan pendidikan secara maksimal, dan lain sebagainya.

Pada dekade terakhir, permasalahan anak jalanan menjadi salah satu permasalahan krusial baik dilihat dari kompleksitas masalah maupun kuantitas dari anak jalanan yang semakin meningkat. Kondisi ini didasari karena kondisi makro sosial ekonomi yang belum kondusif. Pada sisi lain ternyata masih terdapat pemahaman yang rendah mengenai arti penting anak oleh masyarakat, serta komitmen dan tanggung jawab orang tua atau keluarga yang cukup rendah, sehingga menyebabkan ketelantaran pada anak. Anak jalanan merupakan salah satu masalah kesejahteraan sosial yang membutuhkan perhatian secara khusus. Selain karena jumlah yang cukup besar, masalah anak jalanan memiliki lingkup dan cakupan yang tidak bisa berdiri sendiri namun saling terkait dan saling memengaruhi bila kebutuhan dan hak mereka tidak terpenuhi.

Seperti yang tercantum dalam Pedoman Pelayanan Sosial Anak Jalanan (Departemen Sosial RI, 2008:1), permasalahan anak jalanan dapat kita lihat dari berbagai perspektif, diantaranya; 1) anak jalanan yang mengalami masalah dalam

sistem pengasuhan seperti yang dialami anak yatim piatu, anak yatim, anak piatu, anak dari orang tua tunggal, anak dengan ayah/ibu tiri, anak dari keluarga yang kawin muda, dan anak yang tidak diketahui asal-usulnya (anak yang dibuang orang tuanya); 2) anak yang mengalami masalah dalam cara pengasuhan seperti anak yang mengalami tindak kekerasan baik secara fisik, sosial maupun psikologis, anak yang mengalami eksploitasi ekonomi dan seksual serta anak yang diperdagangkan; 3) dan anak yang kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi seperti anak yang kurang gizi dan anak yang tidak bersekolah atau putus sekolah. Hal inilah yang terjadi pada anak jalanan.

Keberadaan dan berkembangnya anak jalanan merupakan persoalan yang perlu mendapat perhatian. Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan dan tempat-tempat umum lainnya (Departemen Sosial RI, 2005: 5). Anak jalanan mempunyai ciri-ciri, berusia antara 5 sampai dengan 18 tahun, melakukan kegiatan atau berkeliaran di jalanan, penampilannya kebanyakan kusam dan pakaian tidak terurus, mobilitasnya tinggi.

Makassar sebagai salah satu kota besar di Indonesia ini memiliki wilayah seluas 175,77 km² dan penduduk sebesar kurang lebih 1,25 juta jiwa. Dalam perkembangan Kota Makassar masih meninggalkan beberapa masalah kesejahteraan sosial, salah satunya permasalahan anak jalanan. Dari tahun ke tahun ke tahun, jumlah anak jalanan peningkatan.

Kecenderungan semakin meningkatnya jumlah anak jalanan merupakan fenomena yang perlu segera ditingkatkan penanganannya secara lebih baik, sebab

jika permasalahan tidak segera ditangani maka di khawatirkan menimbulkan permasalahan sosial baru. Anak jalanan rawan dengan berbagai persoalan seperti ancaman kecelakaan, eksploitasi, penyakit, tindakan kekerasan, trafiking (perdagangan anak) dan pelecehan seksual.

Penanganan masalah anak merupakan tanggungjawab bersama antara masyarakat dan pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, sebagaimana yang di amanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, diantaranya dalam pasal 22, 24, 25, dan 26, diantaranya; negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak; negara dan Pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak; kewajiban dan tanggungjawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Dinas Sosial, telah melakukan berbagai upaya sebagai bentuk tanggungjawab dalam penanganan masalah anak melalui dana dekonsetrasi, misalnya ditahun 2003 telah memberikan pelayanan kepada 60.187 anak di 17 provinsi dan tahun 2004, sebesar 55.930 anak yang tersebar 23 provinsi, serta di tahun 2005 telah melakukan pelayanan terhadap 46.800 anak di 22 provinsi. Dalam kerangka otonomi daerah, pelaksanaan pelayanan sosial anak jalanan yang bersumber dari dana dekonsentrasi disesuaikan dengan peran dan fungsi pemerintah daerah.

Dalam hal ini, Dinas Sosial Kota Makassar sebagai unsur pelaksana otonomi daerah dibidang sosial mempunyai andil besar dalam penanganan permasalahan anak jalanan. Dinas Sosial tidak sendiri, disamping itu ada peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang kerap kali menjadi pendamping bagi anak-anak jalanan, salah satunya adalah Rumah Singgah di Makassar.

Pemerintah Kota Makassar juga telah mengeluarkan kebijakan tentang pembinaan anak jalanan yang dibuat dalam suatu Peraturan Daerah No 2 Tahun 2008 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen di Kota Makassar. Akan tetapi di dalam kenyataannya semua aturan tersebut dirasakan belum efektif dalam menanggulangi masalah anak terutama anak jalanan, terbukti masih banyaknya hak – hak anak yang terabaikan, misalnya tindak kekerasan yang masih terjadi dan belum tertanggulangi, diskriminasi di bidang pendidikan, anak yang berasal dari perekonomian lemah mendapat perlakuan yang berbeda dari anak yang berasal dari ekonomi yang baik, dan banyak lagi.

Penanggulangan permasalahan anak jalanan belum sepenuhnya efektif. Pemerintah hanya terfokus pada anak jalanan yang berada di panti sosial saja namun masih banyak anak – anak jalanan yang berada di luar panti sosial yang belum mendapat perhatian serta minimnya usaha pemerintah dalam hal pencegahan timbulnya anak jalanan dengan pemberdayaan keluarga.

Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dan lembaga-lembaga masyarakat yang peduli pada anak jalanan, belum memberikan solusi terbaik bagi permasalahan anak jalanan. Berdasarkan kondisi anak jalanan yang telah

dipaparkan di atas, maka permasalahan yang dialami oleh anak jalanan dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Anak jalanan terbentuk karena himpitan perekonomian keluarga yang buruk serta kemiskinan
- b. Minimnya pengetahuan orang tua akan hak – hak anak akibat rendahnya pendidikan orang tua
- c. Lingkungan tempat anak jalanan tinggal tidak mendukung mereka untuk masuk ke sekolah formal

Pemerintah RI melalui Depsos dan jajarannya telah berupaya menangani dengan regulasi, pengalokasian dana, fasilitas pelayanan hingga penyediaan rumah singgah. Namun kompleksnya permasalahan jumlah anak jalanan dimana yang terus meningkat menyebabkan penanganannya belum optimal dan efektif. Bukan hanya pemerintah melalui Depsos yang berupaya dalam menangani anak jalanan. Lembaga Swadaya Masyarakat juga ikut berpartisipasi (<http://ratiqhanzen.wordpress.com>)

Berdasarkan uraian di atas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul “ **Efektivitas Pelaksanaan Program Penanganan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Makassar**”

I.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah akan memberikansuatu arahan yang jelas untuk mengadakan penelaahan, serta hasil analisis itu sendiri akan lebih nyata, sehingga peneliti harus membatasi masalah yang akan dianalisis karena dapat membantu

memperjelas pengkajiannya. Sehubungan dengan itu penulis merumuskan masalah, yaitu:

1. Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Program Penanganan Anak Jalanan di Dinas Sosial Kota Makassar
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Program Penanganan Anak Jalanan

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Pelaksanaan Program Penanganan Anak Jalanan di Dinas Sosial Kota Makassar dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penanganan anak jalanan.

I.4 Manfaat Penelitian

I.4.1 Manfaat teoritis

- a. Menambah pengetahuan dibidang social melalui penelitian yang dilaksanakan sehingga memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu administrasi khususnya.
- b. Sebagai bahan pemahaman dan pembelajaran bagi peneliti maupun mahasiswa lain untuk melakukan penelitian-penelitian secara lebih mendalam mengenai Efektivitas Pelaksanaan Program Penanganan Anak Jalanan di Dinas Sosial Kota Makassar.

I.4.2 Manfaat praktis

a. Bagi Dinas Sosial

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan saran atau masukan guna mengambil langkah yang tepat dalam rangka penanganan anak jalanan dan masalah sosial lainnya.

b. Bagi penulis

Memberi kesempatan pada penulis untuk mengaplikasikan ilmu dan teori yang dipelajari selama ini. Selain itu diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai anak jalanan di kota Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Efektivitas

II.1.1 Konsep Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris *effective* artinya berhasil. Sesuatu yang dilakukan dengan baik.

Robbins (1994) mendefinisikan efektivitas sebagai tingkat pencapaian organisasi jangka pendek dan jangka panjang.

Efektivitas memiliki arti berhasil atau tepat guna. Efektif merupakan kata dasar, sementara kata sifat dari efektif adalah efektivitas. Menurut Effendy efektivitas adalah sebagai berikut: "Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan" (Effendy, 2003:14).

Gibson dkk (1994:31) memberikan pengertian efektivitas dengan menggunakan pendekatan sistem yaitu (1) seluruh siklus input-proses-output, tidak hanya output saja, dan (2) hubungan timbal balik antara organisasi dan lingkungannya.

Menurut Sondang P. Siagian pengertian efektivitas adalah:

Pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

Sementara menurut Abdurahmat "efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan

sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya”. Chester I. Barnard memberi definisi efektivitas sebagai berikut: “Efektivitas adalah pencapaian sasaran yang telah disepakati atas usaha bersama. Tingkat pencapaian sasaran menunjukkan tingkat efektivitas”.

Menurut Steers (1997), pada umumnya efektivitas hanya dikaitkan dengan tujuan organisasi, yaitu laba, yang cenderung mengabaikan aspek terpenting dari keseluruhan prosesnya, yaitu sumber daya manusia.

Suatu organisasi yang berhasil dapat diukur dengan melihat pada sejauh mana organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Konsep efektivitas yang dikemukakan oleh para ahli organisasi dan manajemen memiliki makna yang berbeda, tergantung pada kerangka acuan yang dipergunakan. Secara nyata, Stonner (1982) menekankan pentingnya efektivitas organisasi dalam pencapaian tujuan-tujuan organisasi, dan efektivitas adalah kunci dari kesuksesan suatu organisasi.

Sedangkan Miller (1977:292) mengemukakan bahwa:

“Effectiveness be define as the degree to which a social system achieve is goals. Effectiveness must be distinguished from efficiency is mainly concerned with goal attainments.”

(Efektivitas dimaksud sebagai tingkat seberapa jauh suatu sistem sosial mencapai tujuannya. Efektivitas ini harus dibedakan dengan efisiensi. Efisiensi terutama mengandung pengertian perbandingan antara biaya dan hasil, sedangkan efektivitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian suatu tujuan)

Selanjutnya dikatakan oleh Georgopualos dan Tannebaum dalam Etzioni (1969:82)

“...Organization effectiveness as the extent to which an organization as a social system, given certain resources and mean, fulfill it's objective without incapacitating it's means and resources and without placing strain upon it's members.”

(...Efektivitas organisasi adalah tingkat sejauh mana suatu organisasi yang merupakan system sosial dengan segala sumber daya dan sarana tertentu yang tersedia memenuhi tujuan-tujuannya tanpa pemborosan dan menghindari ketegangan yang tidak perlu di antara anggota-anggotanya)

Jadi, secara umum ada pandangan bahwa efektivitas dimaksudkan atau

dapat didefinisikan dalam batas-batas tingkat pencapaian tujuan organisasi. Hall (1974:96) mengartikan bahwa dengan tingkat sejauh mana suatu organisasi merealisasikan tujuannya, semua konsep tersebut hanya menunjukkan pada pencapaian tujuan organisasi, sedangkan bagaimana cara mencapainya tidak dibahas. Yang membahas bagaimana mencapai tingkat efektivitas adalah Argris dalam Silis (1968:312) yang mengatakan:

“Organizational effectiveness then is balanced organization optimal emphasis upon achieving object solving competence and human energy utilization”

(Efektivitas organisasi adalah keseimbangan atau pendekatan secara optimal pada pencapaian tujuan, kemampuan dan pemanfaatan tenaga manusia)

Efektivitas memiliki tiga tingkatan sebagaimana yang didasarkan oleh David

J.Lawless dalam Gibson, Ivancevich dan Donnely (1997:25-26) antara lain:

1. Efektivitas Individu

Efektivitas Individu didasarkan pada pandangan dari segi individu yang menekankan pada hasil karya karyawan atau anggota dari organisasi.

2. Efektivitas Kelompok

Adanya pandangan bahwa pada kenyataannya individu saling bekerja sama dalam kelompok. Jadi efektivitas kelompok merupakan jumlah kontribusi dari semua anggota kelompoknya

3. Efektivitas Organisasi

Efektivitas organisasi terdiri dari efektivitas individu dan kelompok. Melalui pengaruh sinergitas, organisasi mampu mendapatkan hasil karya yang lebih tinggi tingkatannya daripada jumlah hasil karya tiap-tiap bagiannya.

Efektivitas dalam kegiatan organisasi dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran telah dicapai. Sumaryadi (2005:105) berpendapat dalam bukunya "efektivitas implementasi kebijakan otonomi daerah" bahwa: Organisasi dapat dikatakan efektif bila organisasi tersebut dapat sepenuhnya mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Efektivitas umumnya dipandang sebagai tingkat pencapaian tujuan operatif dan operasional. Dengan demikian pada dasarnya efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan atau sasaran organisasional sesuai yang ditetapkan. Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini dapat diartikan, apabila sesuatu pekerjaan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan, dapat dikatakan efektif tanpa memperhatikan waktu, tenaga dan yang lain.

Disimpulkan bahwa konsep tingkat efektivitas organisasi menunjuk pada tingkat jauh organisasi melaksanakan kegiatan atau fungsi-fungsi sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan menggunakan secara optimal alat-alat dan sumber-sumber yang ada. Ini berarti bahwa pembicaraan mengenai efektivitas organisasi menyangkut dua aspek, yaitu :

1. Tujuan organisasi, dan
2. Pelaksanaan fungsi atau cara untuk mencapai tujuan tersebut.

II.1.2 Pendekatan Efektivitas

Untuk menilai apakah sebuah organisasi itu efektif atau tidak, terdapat banyak cara atau pendapat, antara lain yang mengatakan bahwa suatu organisasi efektif atau tidak, secara keseluruhan ditentukan oleh apakah tujuan organisasi itu tercapai dengan baik atau tidak. Teori yang paling sederhana ialah teori yang berpendapat bahwa efektivitas organisasi sama dengan prestasi organisasi secara keseluruhan, pandangan yang juga penting adalah teori yang menghubungkan tingkat kepuasan para anggotanya. Menurut teori ini sesuatu organisasi dikatakan efektif bila para anggotanya merasa puas. Akhir-akhir ini berkembang suatu teori atau pandangan yang lebih komprehensif dan paling umum dipergunakan dalam membahas persoalan efektivitas organisasi adalah kriteria flexibility, productivity dan satisfaction.

Pandangan beberapa ahli mengenai pendekatan yang dapat digunakan dalam mengukur keefektifan organisasi antara:

1. Gibson, Donnely dan Ivancevich (1997:27-29) mengemukakan bahwa pendekatan untuk mengukur efektivitas adalah pendekatan tujuan dan pendekatan sistem.
2. Robbins (1994:58) membagi kedalam empat pendekatan dalam mengukur efektivitas organisasi, yaitu: pendekatan pencapaian tujuan, pendekatan sistem, pendekatan konstituensi-strategis, dan pendekatan nilai-nilai bersaing.

II.1.3 Indikator Efektivitas

Beberapa faktor kritis dalam mengukur keberhasilan suatu organisasi tergantung pada beberapa indikator. Beberapa kriteria tersebut diantaranya tidak mudah untuk diukur secara kuantitatif, misalnya kepuasan, motivasi, dan moral. Kaplan dan Norton (1992, 1993, 1996) menemukan suatu model yang memberikan alternatif untuk perbaikan dalam pengukuran efektivitas organisasi atau kinerja organisasi yang dikenal dengan balanced scorecard yang menggunakan pengukuran internal maupun eksternal, kuantitatif maupun kualitatif, yang dibagi dalam 4 perspektif, yaitu: (1) keuangan, (2) pelanggan, (3) proses internal, dan (4) inovasi.

Perspektif tersebut di atas, dikembangkan oleh Smith (1997) kedalam beberapa indikator, yaitu:

1. Keuangan, diukur dengan indikator : aliran kas, pertumbuhan penjualan, dan pangsa pasar;
2. Pelanggan, diukur dengan indikator: penjualan produk baru, ketepatan waktu pengiriman, kualitas pelayanan;
3. Proses internal, dengan indikator: pemeringkatan teknologi, produktivitas, biaya per unit, dan cycle time;
4. Inovasi, dengan indikator: waktu yang digunakan untuk mengembangkan suatu produk, waktu yang digunakan untuk merespon kebutuhan pasar, fokus terhadap produk baru.

Sementara itu, Sharma dalam Tangkilisan (2005:64) memberikan kriteria atau ukuran efektivitas organisasi yang menyangkut faktor internal organisasi dan faktor eksternal organisasi antara lain:

1. Produktivitas organisasi atau output
2. Efektivitas organisasi dalam bentuk keberhasilannya menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan didalam dan diluar organisasi.
3. Tidak adanya ketegangan didalam organisasi atau hambatan-hambatan konflik di antara bagian-bagian organisasi.

Steers dalam bukunya mengemukakan lima kriteria dalam pengukuran efektivitas organisasi yaitu

1. Produktivitas
2. Kemampuan adaptasi atau fleksibilitas
3. Kepuasan kerja
4. Kemampuan ber laba
5. Pencarian sumber daya

Sedangkan Duncan yang dikutip Richard M. Steers(1985:53) dalam bukunya Efektivitas Organisasi mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pertahapan, baik dalam arti pertahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pertahapan dalam arti periodisasinya.

Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.

2. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Sementara itu Sondang P. Siagian mengemukakan ukuran untuk mencapai tujuan yang efektif ada beberapa kriteria, yaitu:

1. Kejelasan tujuan yang ingin dicapai
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan
3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap
4. Perencanaan yang matang
5. Penyusunan program yang tepat
6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja
7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien
8. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik

II.1.4 Efektivitas Program

Penilaian terhadap tingkat kesesuaian program merupakan salah satu cara untuk mengukur efektivitas program. Efektivitas program dapat diketahui dengan membandingkan tujuan program dengan *output* program (Ditjen Binlantas Depnaker, 1983, dalam Setiawan, 1998).

Sementara itu pendapat peserta program dapat dijadikan sebagai ukuran untuk menentukan efektivitas program. Hal tersebut dinyatakan oleh Kerkpatrick yang dikutip oleh Cascio (1995) bahwa evaluasi terhadap efektivitas program pelatihan dapat dilakukan, diantaranya melalui reaksi peserta terhadap program yang diikuti.

Budiani (2007:53) menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut :

1. Ketepatan sasaran program

Yaitu sejauhmana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.

2. Sosialisasi program

Yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya.

3. Pencapaian Tujuan program

Yaitu sejauhmana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.

4. Pemantuan program

Yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

Menurut Cambel J.P, Pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah :

1. Keberhasilan program
2. Keberhasilan sasaran
3. Kepuasan terhadap program
4. Tingkat input dan output
5. Pencapaian tujuan menyeluruh (Cambel, 1989:121)

II.2 Pengertian Program

Kata program berasal dari bahasa Inggris "*programe*" yang artinya acara atau rencana. Secara konseptual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, program diartikan sebagai rancangan mengenai asas serta usaha yang akan dijalankan oleh seseorang atau suatu kelompok tertentu.

Secara umum pengertian program adalah penjabaran dari suatu rencana. Dalam hal ini program merupakan bagian dari perencanaan. Sering pula diartikan bahwa program adalah kerangka dasar dari pelaksanaan suatu kegiatan. Untuk lebih memahami mengenai pengertian program, berikut ini akan dikemukakan definisi oleh beberapa ahli:

Pariata Westra dkk. (1989:236) mengatakan bahwa:

“Program adalah rumusan yang membuat gambaran pekerjaan yang akan dilaksanakan beserta petunjuk cara-cara pelaksanaannya”

Sondang P. Siagian (2006:1:17)

“Perumusan program kerja merupakan perincian daripada suatu rencana. Dalam hubungannya dengan pembangunan nasional program kerja itu berwujud berbagai macam bentuk dan kegiatan”

Menurut Charles O. Jones, pengertian program adalah cara yang disahkan

untuk mencapai tujuan, beberapa karakteristik tertentu yang dapat membantu seseorang untuk mengidentifikasi suatu aktivitas sebagai program atau tidak yaitu:

1. Program cenderung membutuhkan staf, misalnya untuk melaksanakan atau sebagai pelaku program.
2. Program biasanya memiliki anggaran tersendiri, program kadang biasanya juga diidentifikasi melalui anggaran.
3. Program memiliki identitas sendiri, yang bila berjalan secara efektif dapat diakui oleh publik.

Program adalah unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. Di dalam program dibuat beberapa aspek, disebutkan bahwa di dalam setiap program dijelaskan mengenai:

1. Tujuan kegiatan yang akan dicapai.
2. Kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan.
3. Aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui.
4. Perkiraan anggaran yang dibutuhkan.
5. Strategi pelaksanaan.

Suatu program yang baik menurut Bintoro Tjokroamidjojo (1984:181) harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Tujuan yang dirumuskan secara jelas
 2. Penentuan peralatan yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut
 3. Suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten atau proyek yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan program seefektif mungkin
 4. Pengukuran dengan ongkos-ongkos yang diperkirakan dan keuntungan-keuntungan yang diharapkan akan dihasilkan program tersebut
 5. Hubungan dalam kegiatan lain usaha pembangunan dan program pembangunan lainnya
 6. Berbagai upaya dalam bidang manajemen, termasuk penyediaan tenaga, pembiayaan, dan lain-lain untuk melaksanakan program tersebut.
- Dengan demikian, dalam menentukan suatu program harus dirumuskan secara matang sesuai dengan kebutuhan agar dapat mencapai tujuan melalui partisipasi dari masyarakat.

Dengan beberapa pendapat tersebut di atas maka dapat dapat disimpulkan bahwa program adalah serangkaian tindakan atau aktivitas untuk dapat melaksanakan sesuai dengan target rencana yang telah ditetapkan.

II.3 Anak Jalanan

Menurut Departemen Sosial RI (2005: 5), Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan dan tempat-tempat umum lainnya. Anak jalanan sesungguhnya adalah anak-anak yang termasuk kategori anak rawan atau anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus (children in need of special protection). Dalam Buku Pedoman Pembinaan

Anak Jalanan yang dikeluarkan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur (2001) disebutkan bahwa yang disebutkan anak jalanan adalah anak yang karena suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.

Anak jalanan adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang karena sebab tertentu (karena beberapa kemungkinan: kemiskinan, salah seorang dari orang tua/wali sakit, salah seorang/kedua orang tua/wali pengasuh meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengasuh) sehingga tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar dengan wajar baik jasmani, rohani, maupun sosial.

Anak jalanan menurut Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 1 ayat (6) menyebutkan bahwa anak jalanan adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual. Demikian juga halnya dengan menurut Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pasal 1 ayat (7) menyebutkan anak jalanan adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, kejalananan anak dapat dibedakan menjadi 4 jenis yaitu:

- a. Jalanan secara fisik.
- b. Jalanan secara mental.
- c. Jalanan secara spiritual.

- d. Jalanan secara sosial (Untung, dalam Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial, 2004: 23-24).

Seorang anak dikatakan jalanan, bukan sekedar karena dia sudah tidak lagi memiliki salah satu orang tua atau kedua orang tuanya. Tetapi, jalanan disini juga dalam pengertian ketika hak-hak anak untuk tumbuh kembang secara wajar, untuk memperoleh pendidikan yang layak, dan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai, tidak terpenuhi karena kelalaian, ketidaktahuan orang tua, ketidakmampuan atau kesengajaan.

II.3.1 Karakteristik Anak Jalanan

A. Berdasarkan Usia

Direktorat Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia, Departemen Sosial (2001: 30) memaparkan bahwa anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya dihabiskan untuk mencari nafkah atau berkeliranan di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya, usia mereka berkisar dari 5 tahun sampai 18 tahun. Selain itu dijelaskan oleh Departemen Sosial RI (2001: 23–24), indikator anak jalanan menurut usianya adalah anak yang berusia berkisar antara 5 sampai 18 tahun.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dapat dikategorikan sebagai anak jalanan adalah yang memiliki usia berkisar dikategorikan sebagai anak jalanan adalah yang memiliki usia berkisar antara 5 sampai 18 tahun.

B. Berdasarkan Pengelompokan

Menurut Surbakti dkk. (1997: 59), berdasarkan hasil kajian di lapangan, secara garis besar anak jalanan dibedakan dalam 3 kelompok yaitu: Pertama, *Children on the street*, yakni anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi –

sebagai pekerja anak- di jalan, tetapi masih mempunyai hubungan yang kuat dengan orang tua mereka. Sebagian penghasilan mereka dijalankan pada kategori ini adalah untuk membantu memperkuat penyangga ekonomi keluarganya karena beban atau tekanan kemiskinan yang mesti ditanggung tidak dapat diselesaikan sendiri oleh kedua orang tuanya.

Kedua, *Children of the street*, yakni anak-anak yang berpartisipasi penuh di jalanan, baik secara sosial maupun ekonomi. Beberapa diantara mereka masih mempunyai hubungan dengan orang tuanya, tetapi frekuensi pertemuan mereka tidak menentu. Banyak diantara mereka adalah anak-anak yang karena suatu sebab lari atau pergi dari rumah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak-anak pada kategori ini sangat rawan terhadap perlakuan salah, baik secara sosial, emosional, fisik maupun seksual.

Ketiga, *Children from families of the street*, yakni anak-anak yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan. Meskipun anak-anak ini mempunyai hubungan kekeluargaan yang cukup kuat, tetapi hidup mereka terombang-ambing dari satu tempat ke tempat lain dengan segala risikonya. Salah satu ciri penting dari kategori ini adalah pemampangan kehidupan jalanan sejak anak masih bayi, bahkan sejak anak masih dalam kandungan.

Menurut penelitian Departemen Sosial RI dan UNDP di Jakarta dan Surabaya (BKSNI, 2000: 2-4), anak jalanan dikelompokkan dalam empat kategori, yaitu:

1. Anak jalanan yang hidup di jalanan, dengan kriteria:
 - a. Putus hubungan atau lama tidak bertemu dengan orang tuanya

- b. 8 – 10 jam berada di jalanan untuk bekerja (mengamen, mengemis, memulung) dan sisinya menggelandang/tidur
 - c. Tidak lagi sekolah
 - d. Rata-rata berusia di bawah 14 tahun
2. Anak jalanan yang bekerja di jalanan, dengan kriteria:
- a. Berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya
 - b. 8 – 16 jam berada di jalanan
 - c. Mengontrak kamar sendiri, bersama teman, ikut orang tua atau saudara, umumnya di daerah kumuh
 - d. Tidak lagi sekolah
 - e. Pekerjaan: penjual koran, pengasong, pencuci bus, pemulung, penyemir, dll
 - f. Rata-rata berusia di bawah 16 tahun.
3. Anak yang rentan menjadi anak jalanan, dengan kriteria:
- a. Bertemu teratur setiap hari/tinggal dan tidur dengan keluarganya
 - b. 4 – 5 jam bekerja di jalanan
 - c. Masih bersekolah
 - d. Pekerjaan: penjual koran, penyemir sepatu, pengamen, dll
 - e. Usia rata-rata di bawah 14 tahun
4. Anak jalanan berusia di atas 16 tahun, dengan kriteria:
- a. Tidak lagi berhubungan/berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya
 - b. 8 – 24 jam berada di jalanan

- c. Tidur di jalanan atau rumah orang tua
- d. Sudah taman SD atau SMP, namun tidak bersekolah lagi
- e. Pekerjaan: calo, mencuci bus, menyemir, dll.

C. Berdasarkan Ciri-ciri Fisik dan Psikis

Anak jalanan memiliki ciri-ciri khusus baik secara fisik dan psikis. Menurut Departemen Sosial RI (2001: 23–24), karakteristik anak jalanan pada ciri-ciri fisik dan psikis, yakni 1) Ciri Fisik: warna kulit kusam, rambut kemerah-merahan, kebanyakan berbadan kurus, pakaian tidak terurus, dan 2) Ciri Psikis meliputi mobilitas tinggi, acuh tak acuh, penuh curiga, sangat sensitif, berwatak keras, serta kreatif. Sedang menurut Departemen Sosial RI (2005: 5), anak jalanan mempunyai ciri-ciri, berusia antara 5 sampai dengan 18 tahun, melakukan kegiatan atau berkeliaran di jalanan, penampilannya kebanyakan kusam dan pakaian tidak terurus, mobilitasnya tinggi.

Dari beberapa sumber di atas, dapat disimpulkan bahwa karakteristik anak jalanan berdasarkan ciri-ciri fisik dan psikis mereka adalah:

1. Ciri-ciri fisik
 - a. Penampilan dan warna kulit kusam
 - b. Rambut kemerah-merahan
 - c. Kebanyakan berbadan kurus
 - d. Pakaian tidak terurus
2. Ciri-ciri psikis
 - a. Mobilitas tinggi
 - b. Acuh tak acuh

- c. Penuh curiga
- d. Sangat sensitive
- e. Berwatak keras
- f. Kreatif

II.3.2 Penyebab Anak Menjadi Anak Jalanan

Faktor yang menjadi penyebab mengapa si anak menjadi anak jalanan, antara lain:

1. Faktor keluarga

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya (UU no 10 tahun 1992). dimana keluarga ini merupakan faktor yang paling penting yang sangat berperan dalam pola dasar anak. kelalaian orang tua terhadap anak sehingga anak merasa ditelantarkan. anak-anak sebetulnya hanya membutuhkan perlindungan, tetapi juga perlindungan orang tuanya untuk tumbuh berkembang secara wajar.

2. Faktor pendidikan

Di lingkungan masyarakat miskin pendidikan cenderung dijanankan karena krisis kepercayaan pendidikan dan juga ketidakadaan biaya untuk mendapatkan pendidikan.

3. Faktor sosial, politik dan ekonomi

Akibat situasi krisis ekonomi yang tak kunjung usai, pemerintah mau tidak mau memang harus menyisihkan anggaran untuk membayar utang dan memperbaiki kinerja perekonomian jauh lebih banyak daripada anggaran

yang disediakan untuk fasilitas kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial anak.

Masalah paling mendasar yang dialami oleh anak jalanan adalah kecilnya kemungkinan untuk mendapatkan kesempatan dibidang pendidikan yang layak. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor yaitu :

1. Ketiadaan biaya; sebagian besar anak jalanan berasal dari keluarga dengan strata ekonomi yang sangat rendah, sehingga biaya pendidikan yang seharusnya disediakan oleh keluarga tidak tersedia sama sekali .
2. Keterbatasan waktu; untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sebagian besar anak jalanan bekerja secara serabutan untuk mendapatkan penghasilan, bahkan ada juga yang berusaha untuk mendapatkan penghasilan dari cara-cara yang kurang pantas seperti mengemis, mencuri, mencopet dan lain- lain. Sehingga waktu mereka sehari-hari banyak tersita di tempat pekerjaan, jalanan, tempat-tempat kumuh dan lain-lain.
3. Rendahnya kemauan untuk belajar; kondisi ini disebabkan oleh keadaan lingkungan di sekitarnya (teman-teman) yang didominasi oleh anak-anak yang tidak bersekolah (putus sekolah), sehingga menyebabkan adanya perspektif dalam diri anak jalanan bahwa tidak mendapatkan pendidikan yang formal bukanlah suatu hal yang perlu dicemaskan.
4. Apatisme terhadap pendidikan, kemampuan mereka untuk menghasilkan uang dalam waktu yang singkat menyebabkan mereka apatis terhadap pendidikan. Sangat disayangkan sebenarnya, karena tidak selamanya

mereka harus ada di jalan untuk mengais rejeki, dan pada saat nanti mereka memutuskan untuk keluar dari lingkungan anak jalanan maka modal pendidikan sangat diperlukan.

5. Tidak berjalannya fungsi control oleh keluarga, masyarakat dan pemerintah; kondisi ini disebabkan karena masing-masing disibukkan dengan aktifitasnya masing-masing.

Berdasarkan kondisi anak jalanan yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang dialami oleh anak jalanan dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Anak jalanan turun ke jalan karena adanya desakan ekonomi keluarga sehingga justru orang tua menyuruh anaknya untuk turun ke jalan guna mencari tambahan untuk keluarga. Hal ini terjadi karena tidak berfungsinya keluarga dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Juga disebabkan karena fokus keuangan keluarga terbatas hanya pemenuhan kebutuhan sehari-hari, bukan untuk pendidikan.
- b. Rendahnya pendidikan orang tua anak jalanan sehingga mereka tidak mengetahui fungsi dan peran sebagai orang tua dan juga ketidaktahuannya mengenai hak-hak anak.
- c. Belum adanya payung kebijakan mengenai anak yang turun ke jalan baik kebijakan dari kepolisian, Pemda, maupun Departemen Sosial.
- d. Belum optimalnya social control di dalam masyarakat.
- e. Belum berperannya lembaga-lembaga organisasi sosial, serta belum adanya penanganan yang secara multi sistem base.

- f. Lingkungan sosial tempat anak jalanan tinggal tidak mendukung mereka dari sisi mental psikologis untuk masuk ke sekolah formal
- g. Kurangnya apresiasi masyarakat terhadap potensi dan kreatifitas dari anak jalanan.

II.3.3 Dampak dari Anak Jalanan

1. Dampak bagi individu (anak jalanan)

Anak merasa kasih sayang orang tua yang didapatkan tidak utuh, anak akan mencari perhatian dari orang lain atau bahkan ada yang merasa malu, minder, dan tertekan. Anak-anak tersebut umumnya mencari pelarian dan tidak jarang yang akhirnya terjerat dengan pergaulan bebas. Selain itu juga mengakibatkan anak kurang gizi, kurang perhatian, kurang pendidikan, kurang kasih sayang dan kehangatan jiwa, serta kehilangan hak untuk bermain, bergembira, bermasyarakat, dan hidup merdeka, atau bahkan mengakibatkan anak-anak dianiaya batin, fisik, dan seksual oleh keluarga, teman, orang lain lebih dewasa.

2. Dampak bagi keluarga

Dampak bagi keluarga yaitu keluarga menjadi tidak harmonis (khususnya orang tua), keluarga menjadi tidak utuh, anak tidak diberikan haknya oleh orang tua (hak memperoleh pendidikan, hak mendapatkan kasih sayang orang tua,dll), mementingkan kepentingan masing-masing, tidak berfungsinya control keluarga terhadap anak sehingga anak cenderung bebas dan berperilaku sesuai keinginannya bahkan sampai melanggar norma.

3. Dampak terhadap masyarakat

Masyarakat memandang bahwa setiap anak jalanan itu pastilah sama halnya dengan anak nakal yang selalu melanggar norma-norma yang ada di masyarakat. Selain itu kontrol masyarakat secara kontinyu kepada anak jalanan ini juga masih kurang dan cenderung hanya mementingkan kepentingan masing-masing.

II.4 Program Penanganan Anak Jalanan

Menurut Charles O. Jones Program adalah cara yang di syah kan untuk mencapai tujuan, beberapa karakteristi tertentu yang dapat membawa seseorang untuk mengidentifikasi suatu aktifitas sebagai suatu program atau tidak yaitu:

a. Program cenderung membutuhkan staf

Misalnya: untuk meleksanakan ataupun sebagai pelaku program

b. Program biasanya memiliki anggaran tersendiri, Program kadang bisa juga diidentifikasi melalui anggaran

c. Program memiliki identitas tersendiri, yang bila berjalan secara efektif dapat diakui oleh publik.

Program terbaik di Dunia adalah program yang di dasarkan pada model teoritis yang jelas, yakni sebelum menentukan masalah sosial yang ingin diatasi dan memulai melakukan intervensi, maka sebelumnya harus ada pemikiran yang serius terhadap bagaimana dan mengapa masalah itu terjadi dan apa yang menjadi solusi terbaik. (Jones 1991:296).

Dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh anak jalanan tersebut, merupakan tugas sebagaimana yang diembankan oleh pemerintah tentang

penanganan dan kesejahteraan anak dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik jasmani dan rohani maupun sosialnya. Penanganan yang harus dilakukan bervariasi dimana melalui proses pendidikan, pembinaan mental, dan keagamaan yang berkualitas dengan segala aspek.

Program kesejahteraan sosial bagi anak terdiri atas tiga kegiatan yang dilakukan secara simultan dan saling mendukung satu sama lain, yaitu:

1. Kegiatan Layanan Pemenuhan Dasar

Layanan stimulasi pemenuhan kebutuhan dasar anak penerima manfaat PKSA dilakukan dalam bentuk layanan pemenuhan kebutuhan nutrisi atau makanan bergizi dan pemenuhan kebutuhan peralatan belajar.

2. Kegiatan Layanan Kesiapan Belajar

Kegiatan ini dikenal dengan nama lain pendidikan transisional. Kegiatan yang berupaya mencegah anak putus sekolah dan atau tinggal kelas serta mempersiapkan anak yang putus sekolah untuk memasuki sistem pendidikan formal dan atau nonformal. Kegiatan ini mencakup dua model layanan, yaitu:

- a. Layanan Remedial

Layanan ini diberikan dalam rangka mencegah anak putus sekolah dan atau tinggal kelas

- b. Layanan perantara atau penghantaran (Bridging Course)

Layanan ini diberikan dalam rangka mempersiapkan anak yang putus sekolah untuk memasuki sistem pendidikan formal atau nonformal.

3. Kegiatan Layanan Dukungan

Layanan ini didesain dalam rangka memperkuat layanan pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan kesiapan belajar anak, mencakup aspek hak-hak dan perlindungan anak.

Upaya revitalisasi program penanganan anak jalanan yang semestinya dikembangkan pada tahun-tahun mendatang pada dasarnya bertumpu pada empat program pokok, yaitu:

1. Program penanganan anak jalanan berbasis masyarakat
2. Program perlindungan sosial bagi anak jalanan
3. Program pemberdayaan anak jalanan
4. Program pengembangan asuransi sosial bagi anak jalanan

II.4.1 Pendekatan yang digunakan Dalam Penanganan Anak Jalanan

Pendekatan yang digunakan peksos adalah pendekatan secara individu.

Diantaranya adalah:

1. Peranan sebagai Motivator

Pekerja sosial berperan untuk memberikan motivasi kepada anak jalanan dan orang tuanya untuk mengatasi permasalahan yang dialami.

2. Peranan sebagai Enabler

Pekerja sosial berperan sebagai pemungkin dalam membantu dan meyakinkan anak jalanan dan orantuanya bahwa mereka memiliki kemampuan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dengan pemanfaatan berbagai sistem sumber yang ada.

3. Fasilitator

Peran pekerja sosial memfasilitasi anak jalanan dan orangtuanya untuk mampu melakukan perubahan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama.

4. Broker

Dalam mengatasi masalah yang dihadapi anak jalanan, maka pekerja sosial berperan untuk menghubungkan mereka dengan berbagai system sumber dalam memenuhi keinginan mereka untuk memperoleh keuntungan maksimal.

5. Mediator

Pekerja sosial dapat memerankan sebagai fungsi mediator untuk menjembatani antara anggota kelompok dan sistem lingkungan yang menghambatnya. Kegiatan yang dilakukan sebagai mediator yaitu menghubungkan anak jalanan dan keluarganya dengan sistem sumber yang ada dalam masyarakat baik sistem sumber informal maupun formal.

6. Advocate

Peran advocate atau pembelaan merupakan salah satu praktek pekerjaan sosial yang bersentuhan dengan kegiatan politik. Peran ini dilakukan untuk memperjuangkan hak-hak dan kewajiban anak jalanan.

II.5 Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan alur berfikir peneliti dalam penelitian, untuk mengetahui bagaimana alur berfikir peneliti dalam menjelaskan permasalahan penelitian maka dibuatlah kerangka berfikir sebagai berikut:

Anak merupakan karunia ilahi dan amanah yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Untuk memahami anak jalanan secara utuh, perlu diketahui definisi anak jalanan. Anak jalanan adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang karena sebab tertentu (karena beberapa kemungkinan: kemiskinan, salah seorang dari orang tua/wali sakit, salah seorang/kedua orang tua/wali pengasuh meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengasuh) sehingga tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar dengan wajar baik jasmani, rohani, maupun sosial.

Seperti yang tercantum dalam Pedoman Pelayanan Sosial Anak Jalanan (Departemen Sosial RI, 2008:1), permasalahan anak jalanan dapat kita lihat dari berbagai perspektif, diantaranya; 1) anak jalanan yang mengalami masalah dalam sistem pengasuhan seperti yang dialami anak yatim piatu, anak yatim, anak piatu, anak dari orang tua tunggal, anak dengan ayah/ibu tiri, anak dari keluarga yang kawin muda, dan anak yang tidak diketahui asal-usulnya (anak yang dibuang orang tuanya); 2) anak yang mengalami masalah dalam cara pengasuhan seperti anak yang mengalami tindak kekerasan baik secara fisik, sosial maupun psikologis, anak yang mengalami eksploitasi ekonomi dan seksual serta anak yang diperdagangkan; 3) dan anak yang kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi seperti anak yang kurang gizi dan anak yang tidak bersekolah atau putus sekolah.

Secara psikologis, mereka adalah anak-anak yang pada taraf tertentu belum mempunyai bentukan mental emosional yang kokoh, pada saat sama mereka harus bergelut dengan kehidupan jalanan yang keras dan cenderung berpengaruh negatif bagi perkembangan dan pembentukan kepribadiannya.

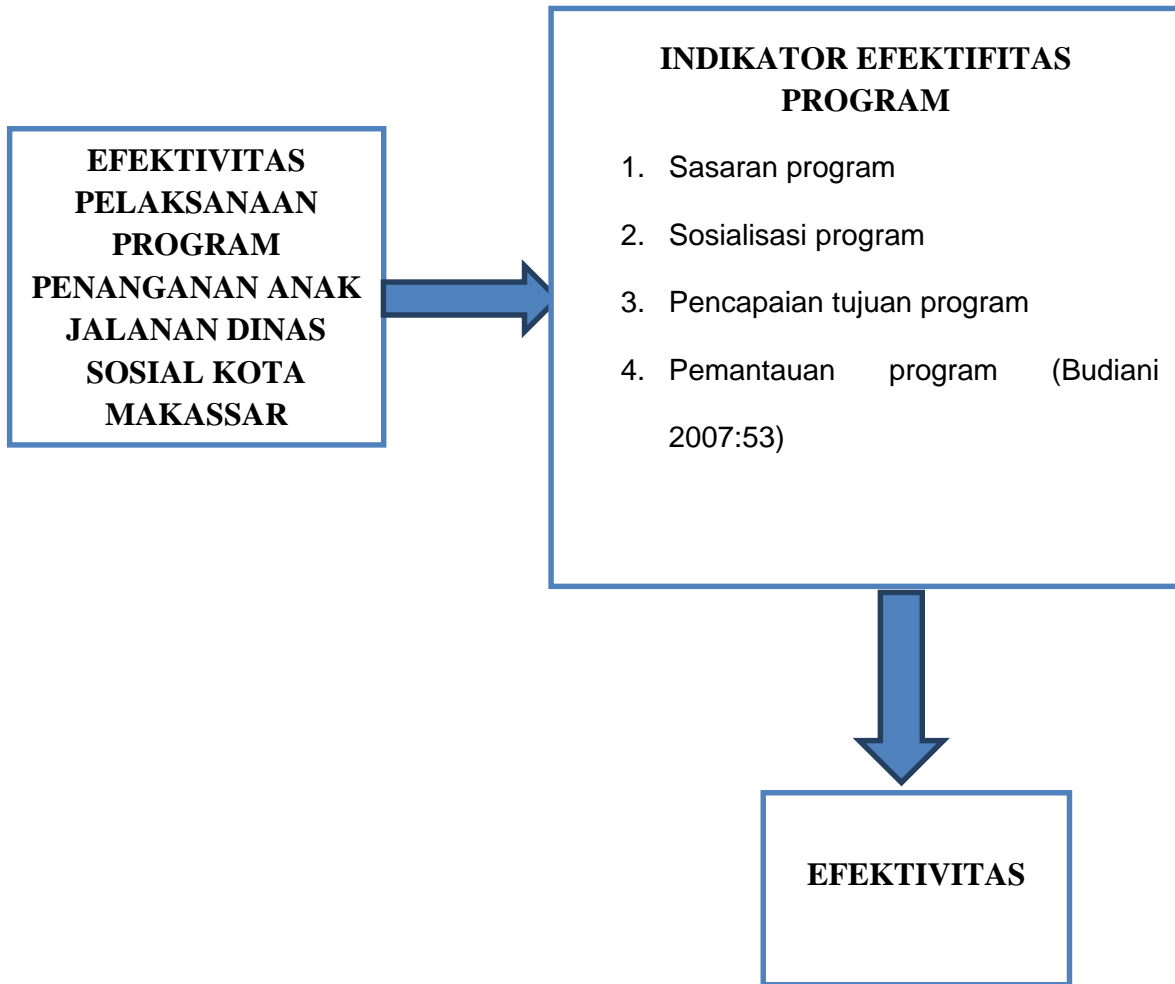
Semua manusia mengharapkan keluarga yang bahagia, bisa membesarkan anak-anaknya dengan maksimal dengan berkecukupan tanpa kekurangan. Akan tetapi dalam kenyataannya, terdapat keluarga yang kondisinya tidak baik atau mengalami disfungsi. Berbagai faktor penyebab disfungsi keluarga ini adalah krisis ekonomi yang berkepanjangan dan kemiskinan, sehingga anak tidak mendapatkan haknya dengan maksimal berupa pengasuhan (kasih sayang, pengertian, dan perhatian

Melihat kenyataan ini Pemerintah Kota Makassar telah mengeluarkan kebijakan tentang pembinaan anak jalanan yang dibuat dalam suatu Peraturan Daerah No 2 Tahun 2008 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen di Kota Makassar serta program-program yang dikeluarkan oleh dinas sosial untuk menangani masalah anak jalanan.

Untuk melihat keefektifan pelaksanaan program penanganan anak jalanan di dinas sosial kota Makassar dapat dilihat dari teori efektivitas dengan indikator sebagai berikut:

1. Sasaran program
2. Sosialisasi program
3. Pencapaian tujuan program
4. Pemantauan program

BAGAN KERANGKA PIKIR



BAB III

METODE PENELITIAN

III.1 Metode Penelitian

Permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti merupakan masalah yang bersifat sosial dan dinamis. Oleh karena itu, peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian tersebut. Penelitian kualitatif ini dapat digunakan untuk memahami interaksi sosial, misalnya dengan wawancara mendalam sehingga akan ditemukan pola-pola yang jelas.

III.2 Penelitian Kualitatif

Secara teoritis format penelitian kualitatif berbeda dengan format penelitian kuantitatif. Perbedaan tersebut terletak pada kesulitan dalam membuat desain penelitian kualitatif, karena pada umumnya penelitian kualitatif yang tidak berpola.

Format desain penelitian kualitatif terdiri dari tiga model, yaitu format deskriptif, format verifikasi, dan format *grounded research*. Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif, yaitu penelitian yang memberi gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi (Koentjaraningrat, 1993:89).

Selanjutnya penulis akan memberikan gambaran dengan secara cermat tentang fenomena yang terjadi mengenai bagaimana efektivitas pelaksanaan program penanganan anak jalanan di dinas sosial kota Makassar.

Sugiyono (2003:11) berpendapat bahwa pada penelitian kualitatif, teori diartikan sebagai paradigma. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan

informasi kualitatif sehingga lebih menekankan pada masalah proses dan makna dengan cara mendeskripsikan sesuatu masalah.

III.3 Lokasi Penelitian

Dalam Penelitian skripsi ini, penulis menentukan salah satu objek penelitian yaitu pada Dinas Sosial Kota Makassar yang berlokasi di Jln AR.Hakim. Dengan pertimbangan memudahkan penulis dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan dan pada akhirnya waktu, tenaga dapat dimanfaatkan seefisien mungkin.

III.4 Tipe dan Dasar Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif. Penelitian deskriptif terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar mengungkapkan fakta dan memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti. Sedangkan dasar penelitiannya adalah studi kasus.

III.5 Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, hal yang menjadi bahan pertimbangan utama dalam pengumpulan data adalah pemilihan informan. Dalam penelitian kualitatif tidak digunakan istilah populasi. Teknik sampling yang digunakan oleh peneliti adalah *purposive sample*.

Purposive sample adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2009:85). Selanjutnya menurut Arikunto (2010:183) pemilihan sampel secara *purposive* pada penelitian ini akan berpedoman pada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut :

1. Pengambilan sampel harus didasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu, yang merupakan ciri-ciri pokok populasi.
2. Subjek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi (*key subjectis*).
3. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat di dalam studi pendahuluan.

Dalam penelitian ini informan yang peneliti maksudkan adalah semua pegawai Dinas Sosial kota Makassar yang terkait dengan program penanganan anak jalanan di Dinas Sosial Kota Makassar, yakni Kepala Bidang dan Staf-staf bagian penanganan anak jalanan.

III.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Pada penelitian kali ini peneliti memilih jenis penelitian kualitatif maka data yang diperoleh haruslah mendalam, jelas dan spesifik. Selanjutnya dijelaskan oleh Sugiyono (2009:225) bahwa pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/triangulasi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara.

1. Observasi

Observasi menurut Kusuma (1987:25) adalah pengamatan yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis terhadap aktivitas individu atau obyek lain yang diselidiki. Adapun jenis-jenis observasi tersebut diantaranya yaitu

observasi terstruktur, observasi tak terstruktur, observasi partisipan, dan observasi nonpartisipasian.

Dalam penelitian ini, sesuai dengan objek penelitian maka, peneliti memilih observasi partisipan. Observasi partisipan yaitu suatu teknik pengamatan dimana peneliti ikut ambil bagian dalam kegiatan yang dilakukan oleh objek yang diselidiki. Sehingga peneliti dapat menentukan informan yang akan diteliti dan juga untuk mengetahui jabatan, tugas/kegiatan, alamat, nomor telepon dari calon informan sehingga mudah untuk mendapatkan informasi untuk kepentingan penelitian.

2. Wawancara

Dalam teknik pengumpulan menggunakan wawancara hampir sama dengan kuesioner. Wawancara itu sendiri dibagi menjadi 3 kelompok yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi-terstruktur, dan wawancara mendalam (*in-depth interview*).

Namun disini peneliti memilih melakukan wawancara mendalam, ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang kompleks, yang sebagian besar berisi pendapat, sikap, dan pengalaman pribadi, Sulisty-Basuki (2006:173).

Untuk menghindari kehilangan informasi, maka peneliti meminta izin kepada informan untuk menggunakan alat perekam. Sebelum dilangsungkan wawancara mendalam, peneliti menjelaskan atau memberikan sekilas gambaran dan latar belakang secara ringkas dan jelas mengenai topik penelitian.

3. Studi Pustaka

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku referensi, laporan-laporan, majalah-majalah, jurnal-jurnal dan media lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian.

4. Dokumentasi

Dokumen menurut Sugiyono, (2009:240) merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen yang digunakan peneliti disini berupa foto, gambar, serta data-data. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan semakin sah dan dapat dipercaya apabila didukung oleh foto-foto.

III.7 Sumber Data dalam Penelitian

1. Data Primer, adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, yakni subjek penelitian atau informan yang berkenaan dengan variabel yang diteliti atau data yang diperoleh dari responden secara langsung (Arikunto, 2010:22).
2. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer. Dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis serta dari studi pustaka. Dapat dikatakan data sekunder ini bisa berasal dari dokumen-dokumen grafis seperti tabel, catatan, SMS, foto dan lain-lain (Arikunto, 2010:22).

III.8 Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Bognan & Biklen (1982) sebagaimana dikutip Moleong (2007:248), adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan

data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain. Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa langkah awal dari analisis data adalah mengumpulkan data yang ada, menyusun secara sistematis, kemudian mempresentasikan hasil penelitiannya kepada orang lain.

McDrury (*Collaborative Group Analysis of Data, 1999*) seperti yang dikutip Moleong (2007:248) tahapan analisis data kualitatif adalah sebagai berikut:

1. Membaca/mempelajari data, menandai kata-kata kunci dan gagasan yang ada dalam data,
2. Mempelajari kata-kata kunci itu, berupaya menemukan tema-tema yang berasal dari data.
3. Menuliskan 'model' yang ditemukan.
4. Koding yang telah dilakukan.

Prosedur analisis data dimulai dengan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Analisis data menggunakan Model Miles dan Huberman, yaitu : reduksi data dengan melakukan pemilahan, pemusnahan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data, memilih dan mengelompokkan data serta membuang data yang tidak diperlukan; data display (Penyajian Data) yaitu menyajikan data dalam bentuk uraian singkat teks yang bersifat naratif; Conclusion Drawing/Verification (Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi)

BAB IV

GAMBARAN UMUM

IV.1. Deskripsi Lokasi Penelitian

IV.1.1 Sejarah Singkat Dinas Sosial Kota Makassar

Dinas Sosial Kota Makassar yang sebelumnya adalah Kantor Departemen Sosial Kota Makassar didirikan berdasarkan Keputusan Presiden No. 44 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen dan Keputusan Presiden No. 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen beserta lampiran-lampirannya sebagaimana beberapa kali dirubah, terakhir dengan Keputusan Presiden No. 49 Tahun 1983.

Khusus di Indonesia Timur didirikan Departemen Sosial Daerah Sulawesi Selatan yang kemudian berubah menjadi Jawatan Sosial lalu dirubah lagi menjadi Kantor Departemen Sosial berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI tahun 1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Departemen Sosial di Propinsi maupun di Kabupaten/ Kotamadya. Dan akhirnya menjadi Dinas Sosial Kota Makassar pada tanggal 10 April 2000 yang ditandai dengan Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Dinas Sosial Kota Makassar berdasarkan Keputusan Walikota Makassar Nomor : 821.22.24.2000 tanggal 8 Maret 2000.

Dinas Sosial Kota Makassar terletak di Jalan Arif Rahman Hakim No. 50 Makassar, Kelurahan Ujung pandang Baru, kecamatan Tallo Kota Makassar, berada pada tanah seluas 499m², dengan bangunan fisik gedung berlantai 2 dan berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kantor Kecamatan Tallo Kota Makassar
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Perumahan Rakyat
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Ujung Pandang Baru
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Perumahan Rakyat

IV.2 Visi, Misi, Dan Tujuan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, maka Visi Dinas Sosial Kota Makassar adalah sebagai berikut:

“ Pengendalian permasalahan sosial berbasis masyarakat tahun 2014 ”

Maknanya adalah manusia membutuhkan kepercayaan diri yang dilandasi oleh nilai-nilai kultur lokal yang diarahkan kepada aspek tatanan kehidupan dan penghidupan untuk menciptakan kemandirian lokal sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan keterampilan kerja, ketentraman, kedamaian, dan keadilan sosial yang mengarah kepada peningkatan kesejahteraan sosial bagi dirinya sendiri, keluarga dan lingkungan sosial masyarakatnya, serta mendorong tingkat partisipasi sosial masyarakat dalam ikut melaksanakan proses pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat.

Misi Dinas Sosial ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan partisipasi sosial masyarakat melalui pendekatan kemitraan dan pemberdayaan sosial masyarakat dengan semangat kesetiakawanan sosial masyarakat
2. Mengembangkan sistem perlindungan sosial
3. Melakukan jaminan sosial
4. Pelayanan rehabilitasi sosial secara optimal

5. Mengembangkan pemberdayaan sosial

Adapun tujuannya sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial yang bermartabat sehingga tercipta kemandirian lokal penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
2. Meningkatkan pendayagunaan sumber daya dan potensi aparatur (Struktural dan Fungsional) dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai untuk mampu memberikan pelayanan di bidang kesejahteraan sosial yang cepat, berkualitas dan memuaskan
3. Meningkatkan koordinasi dan partisipasi sosial masyarakat/ stakeholders khususnya Lembaga Sosial Masyarakat dan Orsos Serta pemerhati di bidang kesejahteraan sosial masyarakat.

IV.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2009 tentang uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Sosial Kota Makassar, maka jabatan struktural pada Dinas Sosial Kota Makassar sebagai berikut :

- 1. Kepala Dinas**

- 2. Sekretaris**

- a. Sub Bagian Kepegawaian
- b. Sub Bagian Keuangan
- c. Sub Bagian Perlengkapan

- 3. Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial**

- a. Seksi Penyuluhan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial

- b. Seksi Pembinaan Keluarga dan penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
- c. Seksi Bimbingan Karang Taruna dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

4. Bidang Rehabilitasi Sosial

- a. Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat
- b. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial
- c. Seksi Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen dan pemulung.

5. Bidang Pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial

- a. Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin
- b. Seksi Penanganan Korban Bencana Sosial
- c. Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial

6. Bidang Bimbingan Organisasi Sosial

- a. Seksi Bimbingan Sumbangan Sosial
- b. Seksi Bimbingan Organisasi Sosial dan Anak Terlantar
- c. Seksi Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Unit Pelaksana Teknis Dinas ini sebagai unsur pelaksana operasional dinas pada Dinas Sosial Kota Makassar

IV.4 Tugas Pokok

1. Kepala Dinas

Dinas Sosial Kota Makassar mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian tugas pokok sesuai kebijakan walikota dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, merumuskan kebijaksanaan, mengoordinasikan, dan mengendalikan tugas-tugas dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada point 1, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang meliputi partisipan sosial masyarakat, perlindungan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial, serta pembinaan organisasi sosial.
- b. Perencanaan program di bidang usaha kesejahteraan sosial, yang meliputi partisipan sosial masyarakat, perlindungan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial, serta pembinaan organisasi sosial.
- c. Pembinaan pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang usaha kesejahteraan sosial, yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial, serta pembinaan organisasi sosial.
- d. Pengendalian dan pengamanan teknis oprerasional di bidang usaha kesejahteraan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial serta bimbingan organisasi sosial

- e. Melakukan pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD)

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pemberian, pelayanan administrasi bagi seluruh satuan kerja di lingkup Dinas Sosial Kota Makassar.

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, mengelola administrasi kepegawaian serta melaksanakan urusan kerumah tanggaan dinas.

b. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menuyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis keuangan.

c. Sub Bagian Perlengkapan

Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis perlengkapan, membuat laporan serta mengevaluasi semua pengadaan barang.

3. Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial

Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, kegiatan dibidang penyuluhan dan bimbingan sosial, pembinaan keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi sumber kesehajteraan sosial (PSKS), pembinaan karang taruna dan pelaksanaan penelitian/ pendataan PMKS dan PSKS.

4. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan rehabilitasi sosial penyandang cacat, rehabilitasi tuna sosial, dan pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen, korban tindak kekerasan pekerja migran.

5. Bidang Pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial

Bidang pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengendalian bantuan, pemberian bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial termasuk pengendalian daerah rawan bencana dan daerah kumuh, bantuan kepada masyarakat fakir miskin serta bantuan kepada korban bencana alam dan sosial serta pelayanan kepada orang terlantar.

6. Bidang Bimbingan Organisasi Sosial

Bidang Bimbingan Organisasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pelayanan terhadap organisasi sosial/LSM dan anak terlantar, pengendalian dan penertiban usaha pengumpulan sumbangan sosial dan undian berhadiah serta melaksanakan pembinaan dan pemahaman pelestarian nilai kepahlawanan, keberintisan dan kejuangan serta kesetiakawanan.

IV.5 Bidang Kewenangan Dinas Sosial

1. Perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial wilayah kabupaten / kota dan pendataan penyandang masalah kesejahteraan sosial
2. Penyuluhan dan bimbingan sosial

3. Pembinaan nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan
4. Pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar (dalam dan luar panti)
5. Pelayanan kesejahteraan sosial anak balita melalui penitipan anak dan adopsi lingkup kabupaten / kota
6. Pelayanan anak terlantar, anak cacat dan anak nakal (dalam dan luar panti)
7. Pelayanan dan rehabilitasi sosial penderita cacat
8. Pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna sosial (tuna susila, gelandangan, pengemis, dan eks narapidana)
9. Pemberdayaan keluarga fakir miskin meliputi fakir miskin, komunitas adat terpencil dan wanita rawan sosial ekonomi
10. Pemberdayaan karang taruna / organisasi kepemudaan
11. Pemberdayaan organisasi sosial / LSM lingkup kabupaten / kota
12. Pemberdayaan tenaga kerja sosial masyarakat
13. Pemberdayaan dunia usaha(partisipasi dalam usaha kesejahteraan sosial)
14. Pemberdayaan pengumpulan sumbangan sosial lingkup kabupaten/kota
15. Penanggulangan korban bencana alam lingkup kabupaten/kota
16. Penanggulangan korban tindak kekerasan (anak, wanita dan lanjut usia)
17. Penanggulangan korban napza
18. Pelayanan kesejahteraan sosial keluarga
19. Pelayanan kesejahteraan angkatan kerja
20. Penelitian dan uji coba pengembangan usaha kesejahteraan sosial lingkup kabupaten/kota. Penyelenggaraan sistem informasi kesejahteraan sosial lingkup kabupaten/kota.

21. Penyelenggaraan pelatihan tenaga bidang usaha kesejahteraan sosial lingkup kabupaten/kota
22. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial lingkup kabupaten / kota
23. Monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial.

Adapun sasaran dari bidang Kewenangan tersebut adalah Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), meliputi

1. Anak Balita Terlantar

Permasalahan pokok yang berkaitan dengan anak balita terlantar antara lain kondisi gizi yang buruk, keterbatasan jangkauan pelayanan sosial bagi anak balita, disamping itu semakin terbatasnya waktu kedua orang tua untuk memberikan perhatian penuh bagi keberlangsungan tumbuh kembangnya anak dalam lingkungan keluarganya.

2. Anak terlantar

Pelayanan sosial yang diberikan kepada anak terlantar yaitu pemberdayaan anak terlantar melalui pemberian bantuan usaha ekonomis produktif dan kelompok usaha bersama serta pemberian latihan keterampilan melalui panti sosial bina remaja.

3. Anak Nakal

Pelayanan sosial yang diberikan terhadap anak nakal yaitu melalui pembinaan dalam panti yang dilaksanakan di Panti Marsudi Putra Salodong.

4. Anak Jalanan

Pelayanan Sosial yang diberikan kepada anak jalanan berupa pemberian beasiswa bagi anak jalanan usia sekolah, pemberian latihan keterampilan dan praktek kerja bagi anak jalanan serta pemberdayaan keluarga anak jalanan.

5. Penjaja seks Komersial (PSK)

Penanganan terhadap PSK yang terjaring melalui razia diberikan pembinaan melalui panti dan non panti. Pembinaan dalam panti berupa pemberian latihan keterampilan yang dilaksanakan di Panti Sosial karya wanita Mattiro Deceng. Sedangkan pembinaan luar panti melalui kegiatan pemberdayaan berupa pemberian latihan keterampilan.

6. Gelandangan Pengemis

Penanganan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial yaitu melakukan pengawasan dan penertiban terhadap gelandangan serta pemberdayaan gelandangan beserta keluarganya melalui pemberian bantuan modal usaha.

7. Eks korban penyalahgunaan narkoba

Seseorang yang pernah menggunakan narkoba, psikotropika dan zat-zat adiktif lainnya termasuk minuman keras di luar tujuan pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.

8. Anak, wanita dan lanjut usia korban tindak kekerasan

Anak berusia 5-18 tahun, wanita yang berusia 18-59 tahun dan lanjut usia yang berusia 60 tahun keatas yang terancam secara fisik atau non fisik (psikologis) yang mengalami tindak kekerasan, diperlakukan salah satu atau

tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya.

9. Penyandang cacat

Pelayanan sosial yang diberikan bagi penyandang cacat adalah pemberian bantuan dana jaminan sosial bagi penyandang cacat berat melalui Departemen Sosial RI.

10. Eks Kusta

Eks kusta adalah seseorang yang pernah menderita penyakit kusta dan telah dinyatakan sembuh secara medis, tetapi mengalami hambatan untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari karena dikucilkan keluarga atau masyarakat. Penanganan yang diberikan bagi eks kusta adalah pembedayaan keluarga eks kusta.

11. Eks Narapidana

Eks narapidana adalah seseorang yang telah selesai masa hukuman atau masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat sehinggamendapat kesulitan untuk mendapatkan kehidupannya secara normal.

12. Lanjut Usia terlantar

Penanganan terhadap lanjut usia terlantar yang masih produktif yaitu pemberdayaan lanjut usia melalui pemberian bantuan usaha ekonomis produktif dan kelompok usaha bersama. Selain itu ada juga pemberian

bantuan pelayanan dan jaminan sosial lanjut usia terlantar yang berasal dari Departemen Sosial RI.

13. Wanita Rawan Sosial Ekonomi

Wanita rawan sosial ekonomi adalah seorang wanita dewasa berusia 18-59 tahun belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

14. Keluarga Fakir Miskin

Pelayanan sosial yang diberikan bagi keluarga fakir miskin yaitu pengembangan potensi keluarga fakir miskin, pemberian latihan keterampilan berusaha bagi keluarga fakir miskin, pendampingan UEP dan KUBE fakir miskin.

15. Keluarga berumah tidak layak huni

Pelayanan sosial yang diberikan adalah rehabilitasi rumah tidak layak huni berupa pemberian bantuan bahan bangunan rumah seperti seng, balok kayu, tripleks dan papan.

16. Perintis Kemerdekaan

Perintis kemerdekaan adalah orang-orang yang telah berjuang mengantarkan Bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan yang diakui dan disahkan melalui kepmensos RI No.15/HUK/1996 sebagai perintis kemerdekaan. Di Kota Makassar Perintis Kemerdekaan ada 6 Orang.

17. Keluarga Pahlawan Nasional

Keluarga pahlawan nasional adalah suami atau isteri dan anak dari seorang pahlawan nasional yang ada di Kota Makassar berjumlah 3 orang.

18. Keluarga Veteran

Keluarga Veteran adalah suami atau isteri dan anak dari seorang yang telah menjadi anggota veteran berdasarkan surat keputusan dari Menteri pertahanan dan keamanan RI. Jumlah keluarga veteran yang ada di kota Makassar yaitu 115 orang.

19. Korban bencana alam

Bantuan yang diberikan bagi korban bencana alam berupa dapur umum, apabila korban lebih dari 10 KK atau 75 jiwa dengan waktu 3 (tiga) hari atau bisa ditambah 2 (dua) hari menjadi 5 (lima) hari apabila keadaan betul-betul darurat, selain itu ada bantuan permakanan dan tenda.

20. Keluarga bermasalah sosial psikologis

Keluarga bermasalah sosial psikologis yang tercatat pada Dinas Sosial yaitu 19 KK.

21. Masyarakat yang tinggal di Daerah Rawan Bencana

Wilayah yang paling rawan bencana di Kota Makassar yaitu kecamatan ujung tanah, karena selain berpendudukan padat juga berlokasi di pesisir pantai.

22. Korban Tindak Kekerasan

Keluarga maupun kelompok yang mengalami tindak kekerasan baik dalam bentuk penelantaran, perlakuan salah, pemaksaan, diskriminasi, dan bentuk kekerasan lainnya maupun orang yang berbeda dalam situasi yang membahayakan dirinya sehingga mengakibatkan penderitaan atau fungsi sosialnya terganggu.

23. Pekerja Migran

Seseorang yang bekerja diluar tempat asalnya menetap sementara ditempat tersebut dan mengalami permasalahan sosial sehingga menjadi terlantar. Pelayanan sosial yang diberikan yaitu pemberdayaan bagi pekerja migran.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

Anak adalah individu yang sejak dilahirkan ke dunia ini sebagai manusia yang tidak berdaya dan lemah. Didalam perjalanan pertumbuhan dan perkembangan hidup anak ditopang oleh orang-orang dewasa yang ada disekitar anak baik ayah, ibu, kakak, maupun saudara dekat yang lain. Topangan yang diberikan melalui pengasuhan, pendidikan, membesarkan dan mencukupi segala kebutuhannya.

Sampai saat ini Bangsa Indonesia masih diperhadapkan dengan masalah-masalah anak. Ada begitu banyak masalah yang terkait dengan anak, termasuk masalah anak jalanan.

Dewasa ini penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Makassar cenderung semakin meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Bertambahnya populasi penyandang masalah kesejahteraan sosial itu berdampak buruk terhadap kehidupan masyarakat utamanya penyandang masalah itu sendiri. Sebagai ibukota propinsi, Kota Makassar selalu diperhadapkan dengan berbagai permasalahan sosial. Salah satu permasalahan sosial yang paling menonjol saat ini adalah anak jalanan. saat ini jumlah anak jalanan semakin bertambah dan merajalela dimana-mana baik itu di perempatan jalan maupun di jalan-jalan protokol.

Pelaksanaan program penanganan anak jalanan di makassar. Dilakukan dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan harapan tidak ada lagi anak jalanan yang beroperasi dijalanan, tetapi kenyataannya masih banyak anak jalanan yang beroperasi di jalanan.

Program yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berkaitan dengan penanganan anak jalanan adalah peningkatan profesionalisme sumberdaya manusia (SDM) aparatur pelaksana sebagai motor penggerak dan aktor utama pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial.

Setelah dilakukan penelitian di lapangan, realitas anak jalanan di Kota Makassar menunjukkan bahwa dibutuhkan banyak sekali pihak yang terlibat untuk menangani permasalahan anak jalanan. Keberadaan anak jalanan menimbulkan kesan bahwa sebuah kota belum maksimal dalam menangani permasalahan sosial di daerahnya. Kehidupan perkotaan yang keras membuat kebanyakan orang harus bisa survive dalam segala kondisi. Setiap orang di kota harus bekerja keras agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun tidak semua usaha yang mereka lakukan akan dibayar dengan kesuksesan, banyak juga yang masih kesulitan secara ekonomi walaupun mereka telah mengerahkan segala kemampuannya. Latar belakang keluarga yang memiliki kesulitan ekonomi akan sangat rentan bagi kehidupan seorang anak.

V.1 Perkembangan Anak Jalanan di Kota Makassar

Kedudukan Kota Makassar sebagai salah satu kota metropolitan mempunyai daya tarik tersendiri bagi berlangsungnya berbagai kegiatan usaha dan pembangunan, namun efek dari berbagai kebijakan pembangunan juga tidak terlepas dari timbulnya permasalahan sosial yang berupa gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban sosial akibat ulah dari sekelompok anak jalanan (Anjal), Gelandangan dan pengemis.

Perbedaan antara anak jalanan dengan gelandangan dapat dilihat dari umurnya. Yang dikatakan anak jalanan itu berkisaran 6-18 tahun, jika sudah 18 tahun keatas akan dikatakan sebagai gelandangan dan pengemis (gepeng)

Selanjutnya disajikan perkembangan anak jalanan dan gelandangan dalam beberapa tahun ini:

Tabel V.1. Perkembangan jumlah anak jalanan dan gelandangan di Kota Makassar, Tahun 2007 s/d 2013

No	Tahun	Jumlah		
		Anak Jalanan	Gelandangan	Total
1	2007	1407	280	1687
2	2008	869	340	1209
3	2009	870	144	1014
4	2010	901	186	1087
5	2011	918	204	1122
6	2012	990	269	1259
7	2013	1043	309	1352
	Rata-rata	1003	247	1247

Sumber : Dinas Sosial Kota Makassar, 2015

Dari Tabel 1 diatas menunjukkan bahwa jumlah anak jalanan dan gelandangan selama 6 tahun mengalami penurunan pada tahun 2007 ke 2008 sebanyak 538 orang. Namun, meski mengalami penurunan jumlah pada tahun 2008, jumlah anak jalanan setiap tahun kembali mengalami peningkatan. Peningkatan terhadap jumlah anak jalanan dari tahun 2008 ke 2009 hanya 1 orang, tahun 2009

ke 2010 peningkatan jumlah anak jalanan sebanyak 31 orang, dan dari 2010 ke 2011 sebanyak 17 orang, tahun 2011 ke 2012 peningkatan sebanyak 72 anak, dan tahun 2012 ke 2013 sebanyak 53 anak.

Pada umumnya anak yang turun kejalanan menganggap bahwa dunia jalanan merupakan tempat yang menjanjikan, walaupun dunia jalanan penuh dengan resiko. Namun hal ini tidak membuat mereka takut untuk menjalaninya. Kebanyakan mereka turun ke jalan pada usia belasan bahkan adapula yang masih berusia dibawah sepuluh tahun. Anak jalanan dilihat dari sebab dan intensitas mereka berada di jalanan memang tidak dapat disamaratakan. Dilihat dari sebab, sangat dimungkinkan tidak semua anak jalanan berada di jalanan karena tekanan ekonomi, boleh jadi karena pergaulan, pelarian, tekanan orang tua, atau atas dasar pilihannya sendiri. Berdasar survey yang pernah dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar diketahui bahwa latar belakang terbanyak yang menyebabkan anak turun ke jalan adalah karena permasalahan ekonomi yang mencapai 69%, kemudian disusul faktor lingkungan dan faktor keluarga yang tidak harmonis yaitu 31%.

Dalam memudahkan penganalisisan penelitian ini, akan disajikan matrik tentang penanganan anak jalanan yang dilakukan oleh pemerintah.

V.2 Penanganan Anak Jalanan oleh Dinas Sosial Kota Makassar

Keberadaan anak jalanan merupakan salah satu permasalahan sosial yang membutuhkan penanganan secara intensif dan mendalam agar bisa bersentuhan langsung dengan akar penyebab permasalahannya. Penyebab utama anak turun ke jalan pada dasarnya adalah kesulitan ekonomi, yang ada di lingkungan keluarga, walaupun ada penyebab lain seperti keretakan rumah tangga, perceraian, pengaruh

teman dan lingkungan sosial setempat. Kesulitan ekonomi akan menciptakan suasana yang tidak kondusif dalam lingkungan keluarga sehingga kebutuhan-kebutuhan pokok menjadi tidak terpenuhi, dan anak akan mencari cara agar bisa memenuhi kebutuhan tersebut.

Kesulitan ekonomi yang dialami keluarga akan menyebabkan berbagai masalah, karena akan menciptakan suasana keluarga yang tidak kondusif sehingga akhirnya kebutuhan dan hak anak tidak terpenuhi. Melihat kebutuhan mereka tidak terpenuhi maka anak akan mencari cara untuk memenuhinya, dan cara yang dipilihnya adalah turun ke jalan menjadi pengamen. Selain faktor kesulitan ekonomi penyebab anak jalanan turun ke jalan juga disebabkan keluarga yang broken home. Dari pengakuan beberapa anak jalanan mengatakan bahwa salah satu dari kedua orang tua mereka sudah tidak merawat mereka lagi, bahkan ada yang sejak kecil belum pernah melihat ayahnya sama sekali. Keadaan keluarga yang tidak lagi utuh ini tentu membuat beban dari orang tua tunggal akan semakin berat untuk membesarkan anak-anaknya. Keadaan yang demikian akan membuat anak melakukan respon terhadap stimulus yang diberikan orang tuanya, yaitu timbul keinginan untuk membantu mencari uang.

Sebelum melakukan penanganan, Dinsos membentuk Tim Kerja yang dimaksudkan untuk membantu proses penanganan anak jalanan di lapangan. Tim Kerja tersebut meliputi: Dinsos, Kepolisian, Satpol PP. Tim kerja tersebut nantinya akan melakukan langsung tugas di lapangan yaitu untuk melakukan penjaringan. Penjaringan dilakukan di setiap pusat-pusat keramaian di Kota Makassar yang meliputi terminal, pantai, dan perempatan lampu merah di berbagai lokasi.

Sasarannya adalah Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar dan Anak jalanan. Langkah-langkah penanganan yang dilakukan Dinas Sosial yaitu: Penjaringan, Identifikasi, Home visit, Pelatihan Keterampilan. Dalam melakukan penjaringan ini peran Satpol PP dan Kepolisian hanya sebagai pengawal dan penjaga bila mana ada sesuatu yang tidak diinginkan ketika ada di jalan. Sedangkan petugas yang melakukan penjaringan langsung adalah dari Dinsos.

Penjaringan merupakan langkah pertama yang dilakukan oleh Dinsos. Penjaringan langsung dilakukan di lapangan yaitu di tempat-tempat strategis dan pusat keramaian di 24 titik di kota Makassar. Dalam pelaksanaannya penjaringan dilakukan secara rutin, berselang sehari.

Setelah dilakukan penjaringan, langkah selanjutnya adalah melakukan identifikasi terhadap anak yang terjaring. Identifikasi tersebut adalah pendataan terhadap anak yang meliputi nama, umur, alamat, orang tua dan keterangan lain seperti masih sekolah atau tidak, penyebab turun ke jalan. Proses Identifikasi ini nantinya akan diketahui dari mana anak jalanan tersebut berasal. Bila dia berasal dari luar daerah maka akan langsung dipulangkan, sedangkan yang berasal dari dalam daerah akan dilakukan home visit. Home visit merupakan langkah yang diambil sebagai upaya mengetahui lebih dalam mengenai kondisi anak serta kondisi keluarganya. Dari home visit tersebut, nanti akan diketahui mengenai latar belakang keluarganya, kondisi perekonomian orang tuanya, penyebab anak turun ke jalan dan bila terjadi bisa ditemukan bentuk eksploitasi anak. dari keterangan-keterangan tersebut, juga akan ditinjau kembali melalui tetangga dan lingkungan masyarakat setempat agar nantinya bisa diperoleh data yang benar. Jika dalam keterangan

tersebut diperoleh mengenai perekonomian orang tua anak jalanan yang benar-benar dibawah garis kemiskinan, maka bisa juga dimasukkan ke dalam Program Pemberian Bantuan Modal Usaha Ekonomis Produktif (UEP) yang nanti akan dapat pelatihan keterampilan dan bantuan dari pemerintah.

Jika penjarangan, identifikasi dan home visit sudah dilakukan maka langkah selanjutnya adalah pelatihan keterampilan. Ini merupakan puncak dari pelaksanaan program yang melibatkan langsung anak jalanan di dalamnya melalui pemberdayaan. Pelatihan keterampilan yang dilakukan Dinsos, setiap tahun mengalami perubahan karena memang harus mengikuti bakat dan keterampilan yang dimiliki anak. Setelah mengikuti pelatihan nantinya peralatan tersebut akan diberikan langsung kepada anak jalanan, sehingga nanti mereka bisa mempraktekkannya dan mengembangkan usahanya. Tidak berhenti sampai disitu, Dinsos juga akan melakukan monitoring terhadap pelatihan yang sudah diberikan. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui tentang kelanjutan anak jalanan itu dalam mengembangkan pelatihan yang sudah diterima.

Selanjutnya, dinas sosial kota Makassar menggelar kegiatan kampanye dan sosialisasi tentang keberadaan Peraturan sebagai pengikat dan juga memberikan informasi tentang larangan kepada masyarakat pada umumnya untuk tidak membiasakan memberikan uang di jalanan. Kegiatan kampanye dan sosialisasi dilakukan pada lingkungan masyarakat Kota Makassar. Kegiatan kampanye dilakukan melalui pertunjukan, orasi, dan pemasangan spanduk atau baliho untuk tidak memberikan uang pada anak jalanan. Sedangkan bentuk sosialisasi sendiri terbagi atas dua bentuk, yaitu baik secara langsung maupun tidak langsung.

PEMBINAAN PENCEGAHAN



V.3 Efektivitas Pelaksanaan Program Penanganan Anak Jalanan Dinas Sosial Kota Makassar

V.3.1 Sasaran Program

Sasaran program merupakan target dari pemerintah yang hendak dijadikan sebagai peserta program penanganan anak jalanan di dinas sosial kota makassar dengan maksud agar program ini memiliki nilai kebermanfaatan yang lebih tinggi bagi masyarakat. Dalam menganalisis mengenai ketepatan sasaran program terdapat tiga indikator yang diujikan yaitu ditujukan untuk anak jalanan itu sendiri, orangtua anak jalanan, dan masyarakat.

1. Ditujukan kepada Anak Jalanan

Pada program penanganan anak jalanan yang menjadi target utama adalah anak-anak yang berusia 6-18 tahun yang banyak menghabiskan waktunya di jalaan, baik yang masih duduk di bangku sekolah ataupun sudah putus sekolah.

Keberadaan anak jalanan yang menghuni sejumlah titik lokasi dan sudut jalan, terutama di daerah jalan yang ramai arus lalu lintas, tidak jarang dikeluhkan oleh masyarakat karena di nilai sering mengganggu pengguna jalan, membuat jalan macet, bahkan sudah seringkali meresahkan masyarakat khususnya pengguna jalan.

Sasaran dari program ini adalah anak-anak jalanan yang terjaring razia oleh tim kerja dinas sosial. Jadi setiap anak yang jalanan yang ditemui di lokasi sasaran sebisa mungkin untuk dapat di rekrut untuk menjadi anak binaan. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Bapak Mas'ud selaku kepala bidang rehabilitas sosial:

“untuk jumlah anak jalanan yang kita bina tidak dibatasi, jadi apabila saat razia kami mendapat seratus anak maka seratus anak itu akan kami bina.

Dari anak-anak ini kami akan memperoleh data-data mengenai diri mereka, alasan mengapa mereka turun di jalan.” (Wawancara 13April 2015)

Dari hasil wawancara ini penulis melakukan penelusuran lebih lanjut dengan melihat data-data anak dan pekerjaan orang tua mereka, dan diperoleh informasi bahwa memang anak-anak yang terjaring razia ada yang masih duduk di bangku sekolah dasar ada juga yang sudah putus sekolah karena keterbatasan ekonomi.

Hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh salah satu staff di dinas sosial yang mengatasi anak jalanan:

“iya, anak-anak yang terjaring razia biasanya ada yang masih duduk di bangku sekolah dasar ada juga yang sudah putus sekolah, mereka biasanya bekerja di jalan sebagai pemulung, pengamen, dan penjual koran” (Wawancara 13April 2015)

Dalam proses penanganan anak jalanan, harus pula diperhatikan pendidikan untuk anak jalanan, karena sesuai dengan peraturan pemerintah wajib belajar 9 tahun. Hal ini sesuai dengan pendapat bapak Mas'ud selaku kepala bidang:

“anak-anak jalanan yang masih duduk di bangku sekolah dasar maka kami akan bekerja sama dengan dinas pendidikan untuk memberikan beasiswa dan kami dari dinas sosial akan memberikan bantuan berupa paket pendidikan agar mereka bisa melanjutkan sekolah. Sedangkan untuk anak yang putus sekolah di bangku SMP kami mendaftarkan mereka untuk mengikuti ujian paket B, dan kalau anak yang putus sekolah di bangku SMA kami mendaftarkan mereka untuk mengikuti ujian paket C” (Wawancara, 13April 2015)

Hal ini didukung oleh pernyataan salah satu mantan anak jalanan yang mendapatkan bantuan berupa paket pendidikan di bangku SMP, Ajis mengatakan:

“Sekarang saya bisa sekolah karena mendapatkan bantuan dari dinas sosial di sekolah juga saya mendapatkan beasiswa bagi orang yang tidak mampu” (Wawancara, 22 April 2015)

Hal ini diperkuat dengan pernyataan Tika:

“Saya bisa sekolah lagi karena bantuan dari Dinas sosial, kalau biasanya orang tua saya tidak mampu untuk membeli perlengkapan sekolah, sekarang saya mendapatkannya dari dinas sosial” (Wawancara, 24 April 2015)

Pada saat tahun 2014 anak yang di didik oleh dinas sosial yang di sebarakan di panti-panti, berjumlah 555 anak dari 687 anak yang terjaring razia, sedangkan 132 anak lainnya tidak mengikuti pelatihan di karenakan pada saat pendataan anak tersebut memberikan data-data palsu. Hal ini di perjelas oleh salah satu staff di bidang penanganan anak jalanan, Bapak Burhanuddin mengatakan:

“Tahun 2014 kami berhasil melakukan penjaringan pada 687 anak, tapi yang di bina oleh kami dan panti-panti semua hanya berjumlah 555 anak saja, 132 anak yang lainnya pada saat kami mendatangi rumah mereka ternyata anak tersebut tidak tinggal di daerah itu” (Wawancara, 15April 2015)

Sasaran utama kegiatan pelatihan ini adalah anak jalanan yang putus sekolah atau anak binaan yang tidak mendapat bantuan beasiswa, namun bagi anak jalanan yang masih sekolah tetapi berminat untuk meningkatkan kemampuannya maka mereka ditujukan untuk mengikuti pelatihan keterampilan. Sedangkan tujuan dari kegiatan ini yaitu membekali ketrampilan tertentu agar mereka siap bekerja serta mendidik anak jalanan menjadi warga masyarakat yang produktif. Dalam kegiatan pelatihan ini anak binaan akan memperoleh pelatihan.

Jadi, berdasarkan hasil wawancara dan melihat data-data yang ada penulis menyimpulkan bahwa dalam sasaran program penanganan anak jalanan ini memang sudah tepat dengan membina anak jalanan baik yang masih duduk di bangku sekolah maupun yang sudah putus sekolah. Bagi yang masih sekolah akan diberikan bantuan berupa beasiswa dan perlengkapan-perengkapan sekolah, sedangkan untuk anak yang sudah tidak bersekolah akan diberikan pelatihan

keterampilan. Walaupun jumlah anak jalanan yang dibina tidak sama dengan jumlah anak jalanan yang sudah terjaring.

2. Ditujukan kepada Orang Tua

Meningkatnya jumlah anak jalanan di sudut kota sebagai akibat dari permasalahan yang dihadapi oleh keluarganya. Penanganan anak jalanan yang berbasis keluarga merupakan pendekatan yang tepat dan efektif karena keluarga merupakan tempat terdekat dari sang anak.

Ketidakmampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan anggota dalam keluarga mengharuskan seorang anak untuk ikut bekerja dalam mencari nafkah keluarga. Hal ini senada dengan hasil wawancara penulis dengan Iqbal, seorang pengamen di fly over:

“saya disuruh sama mamaku minta-minta di jalan, karena kalau saya tidak pergi minta-minta biasanya saya tidak di beri makan sampai ada uang saya bawa pulang”(Wawancara, 20April 2015)

Penulis juga berhasil mewawancarai seorang kakak beradik yang menjual koran di pinggiran jalan sekitar masjid raya. Ical mengatakan:

“Saya sama adeku biasanya kalau pulang sekolah, langsung kesini untuk menjual koran dengan masih menggunakan baju seragam. Karena kalau tidak begini, tidak ada saya dapat uang buat belanja” (Wawancara, 21April 2015)

Dari hasil wawancara diatas dapat kita lihat bahwa penyebab anak turun di jalan adalah faktor ekonomi keluarga yang menuntut anak ikut andil dalam mencukupi kebutuhan keluarganya.

Program penanganan anak jalanan berbasis keluarga bertujuan agar terciptanya keberfungsian sosial keluarga, sehingga akan berdampak pada salah satu anggota keluarga yaitu anakyang terpenuhi hak-haknya sebagai seorang anak.

Kegiatan pemberdayaan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan (data terlampir) yang dimaksudkan untuk orang tua, keluarga dan/atau walinya meliputi beberapa kegiatan. Yaitu, pelatihan keterampilan berbasis rumah tangga, pelatihan kewirausahaan, pelatihan bantuan modal usaha ekonomis produktif, pembentukan kelompok usaha bersama, dan pengembangan kelompok usaha bersama.

Pertama, yang dimaksud dengan pelatihan keterampilan berbasis rumah tangga yaitu pelatihan yang dilakukan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang disesuaikan dengan bakat dan minat serta lingkungan sosialnya. Kegiatan ini dilakukan dengan melibatkan Dinas Sosial Kota Makassar yang bekerja sama dengan sektoral dan para stakeholder lainnya. Pelatihan ini meliputi seperti pelatihan jahit-menjahit, memasak, kerajinan rumah tangga, dan hal-hal umum yang biasa menjadi pekerjaan ibu rumah tangga lainnya.

Kedua, yaitu Pelatihan Kewirausahaan. Pelatihan ini dilakukan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang prinsip-prinsip usaha kecil dan menengah yang disesuaikan dengan keterampilan mereka miliki berdasarkan kondisi lingkungan tempat mereka berdomisili, sehingga mereka mampu beradaptasi dan dapat termotivasi untuk melakukan aktivitas usahanya guna membantu mencukupi penghasilan keluarganya yang di butuhkan. Kegiatan ini dilakukan dengan melibatkan Dinas Sosial Kota Makassar bekerja sama dengan instansi-instansi yang terkait.

Ketiga yaitu, pemberian bantuan modal usaha ekonomis peroduktif. Inidilakukan bertujuan untuk memberikan bantuan stimulant berupa

berupa barang/atau barang dagangan dan/atau modal usaha kecil sebagai modal dasar dalam rangka untuk membentuk, memotivasi serta untuk menciptakan kemandirian keluarga yang dilakukan secara perorangan. Dinas Sosial Kota Makassar yang bekerja sama dengan instansi-instansi terkait telah banyak memberi bantuan modal dan usaha bagi keluarga anak jalanan yang kurang mampu, seperti bahan makanan ataupun modal untuk menghidupi kebutuhan keluarganya.

Keempat yaitu, Pembentukan Kelompok Usaha Bersama. Kegiatan dilakukan dengan maksud untuk mengembangkan usaha eknomis produktif baik yang telah diberi modal maupun barang melalaui pembinaan dengan cara membentuk kelompok keluarga yang memiliki jenis usaha yang sama antara lima sampai dengan sepuluh keluarga.

Dan yang *kelima* yaitu, Pengembangan Kelompok Usaha Bersama. Maksud dari kegiatan ini yaitu untuk mengembangkan usaha kelompok yang terdiri dari lima sampai dengan sepuluh keluarga yang ikut serta dan berhasil melalui pemberian modal usaha eknomis produktif dan juga pembentukan usaha kelompok bersama.

Hal ini di senada dengan apa yang dikatakan oleh kepala bidang Rehabilitas Sosial, Bapak Mas'ud mengatakan:

“Ada lima macam bentuk pemberdayaan terhadap keluarga anak jalanan yang dapat kita berikan. Dua diantaranya merupakan bentuk pelatihan, dan selebihnya yaitu pembentukan kelompok untuk usaha eknomis produktif bersama dalam hal kegiatan yang biasa dikerjakan sesuai dengan kondisi tempat tinggalnya, sperti usaha bengkel, usaha transportasi, usaha jahit-menjahit, usaha kios, usaha salon, ataupun usaha warung kecil, lalu di berikan modal untuk mengembangkan usaha tersebut serta untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Kegiatan pemberdayaan ini harus di awasi, di pantau secara berkala agar nantinya mereka tidak kembali ke jalan dan melakukan aktifitas yang sama di jalan-jalan yang berada di Kota Makassar. (Wawancara, 16 April 2015).

Sejalan dengan keterangan diatas Bapak Haidar selaku Kepala Seksi Penanganan Anak Jalanan mengatakan, bahwa:

“Kami memberikan modal usaha dalam bentuk barang, agar mereka bisa menghidupi keluarganya dan kebutuhan sehari-hari anaknya.” (Wawancara, 16April 2015)

Dari hasil wawancara di atas, penulis melakukan konfirmasi kepada salah satu orang tua dari anak jalanan. Ibu Rubasia mengatakan:

“Iya, saya memang mendapatkan bantuan dari dinas sosial berupa jualan campuran. Dan sampai saat ini, saya masih jalankan itu usaha karena sangat membantu dalam masalah keuangan keluargaku” (Wawancara, 18April 2015)

Hal ini juga didukung oleh pengakuan Ibu Badaria, beliau mengatakan:

“Saya mendapatkan bantuan modal usaha dari dinas sosial berupa modal dasar. Dan modal itu saya pakai untuk jual-jualan minuman dingin. Hasilnya lumayan karena tidak di kembalikan modalnya” (Wawancara, 18 April 2015)

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa dalam sasaran program penanganan anak jalanan untuk orang tua anak jalanan ini memang sudah tepat dengan memberikan bantuan modal usaha dan pengetahuan tentang bagaimana cara meningkatkan suatu usaha. Karena penyebab utama yang mengakibatkan anak turun ke jalan adalah faktor ekonomi keluarga yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan anak.

3. Ditujukan kepada Masyarakat

Partisipasi masyarakat luas dalam pelaksanaan berbagai program memang sangat dibutuhkan, karena tanpa dukungan dari masyarakat maka program-program tersebut tidak akan memberikan hasil yang memuaskan. Keterlibatan masyarakat dalam penanganan anak jalanan akan memberikan kontribusi dalam penyelesaian masalah anak jalanan. Bentuk partisipasi masyarakat yang diharapkan antara lain:

1. Tidak memberikan sedekah kepada anak pengemis anak atau membeli barang dan jasa anak jalanan. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Haidar selaku kepala seksi anak jalanan:

“Kami selalu menghimbau kepada masyarakat, agar tidak memberikan uang kepada anak-anak jalanan. Sebab jika mereka di biasakan di berikan uang maka anak-anak tersebut juga akan terus turun di jalan untuk meminta-minta” (Wawancara, 16April 2015)

Sejalan dengan wawancara di atas penulis melakukan konfirmasi kepada Bapak Burhanuddin, selaku staff di bidang rehabilitas sosial:

“Kami selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat, terkhusus kepada pengendara kendaraan yang beraktivitas di jalan, kami menghimbau sekaligus menyuarakan lewat mikropon agar merka tidak memberikan uang kepada anak yang beraktivitas di jalan” (Wawancara, 15April 2015)

2. Menyalurkan bantuan melalui lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang kompeten, transparan, dan dapat mempertanggung jawabkan anggaran yang dikelolanya. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Mas’ud selaku kepala bidang rehabilitas sosial:

“kalau masyarakat hendak membantu anak jalanan, sebaiknya masyarakat lansung mendatangi rumah anak tersebut, atau dengan menyumbang di panti-panti yang mengurus mereka”. (Wawancara, 15April 2015)

3. Masyarakat lebih peduli terhadap anak jalanan dan memberi dukungan positif

Berdasarkan wawancara di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa program penanganan anak jalanan yang ditujukan oleh masyarakat agar mereka tidak memberikan uang kepada anak yang meminta-minta di jalan memang sudah tepat. Karena peran masyarakat memang sangat penting, apabila masyarakat terus memberikan belas kasihan kepada anak jalanan dengan cara memberikan uang di

jalan, maka anak jalanan akan melakukan hal tersebut berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan anak. Apabila masyarakat yang hendak membantu anak jalanan sebaiknya menyumbangkan bantuan melalui lembaga-lembaga swadaya masyarakat atau panti-panti yang mengurus mereka.

V.3.2 Sosialisasi Program

Sosialisasi program merupakan titik awal yang menentukan keberhasilan program dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu sosialisasi program harus dilakukan dengan cara-cara yang terencana dan sistematis dengan memberdayakan sumber daya yang dimiliki oleh suatu organisasi agar tujuan yang direncanakan tercapai dengan baik.

Komunikasi Dinas Sosial Kota Makassar dalam usahanya untuk menyelesaikan permasalahan anak jalanan, tentunya tidak hanya teletak kepada para aparaturnya saja, tetapi diperlukan pula suatu komunikasi berupa sosialisasi terhadap masyarakat Kota Makassar baik itu secara langsung maupun tidak langsung, hal tersebut perlu untuk dilaksanakan karena bagaimanapun masyarakat Kota Makassar merupakan objek utama dari para anak jalanan di Kota Makassar untuk mendapatkan penghasilan.

Pemberian uang kepada para anak jalanan yang secara langsung dilakukan oleh masyarakat, merupakan suatu kebiasaan yang telah dianggap lumrah dan ironisnya hal tersebut merupakan suatu tindakan yang tidak dapat dicegah atau dapat diberikan hukuman, dengan dibiarkannya masyarakat untuk memberikan uang kepada para anak jalanan secara langsung dan cuma-cuma akan menjadikan

proses pemberdayaan yang dilaksanakan berjalan sia-sia, karena anak jalanan besar kemungkinan untuk kembali kejalanan.

Perlunya sosialisasi terhadap masyarakat menyangkut sedekah (pemberian uang secara langsung dan cuma-cuma), telah pahami oleh Dinas Sosial Kota Makassar dengan mendirikan papan-papan himbauan yang dipasang di beberapa titik di Kota Makassar, namun sosialisai tersebut tentunya tidak akan berjalan bilamana masyarakat sendiri khususnya tidak dapat bekerjasama terhadap kebijakan yang diambil oleh Dinas Sosial Kota Makassar menyangkut pemindahan sumbangan tempat-tempat yang semestinya, seperti kepada Rumah Perlindungan Anak (RPA) atau panti asuhan yang ada di Kota Makassar.

Selama ini dinas sosial dalam melakukan sosialisasi program beberapa media yang digunakan untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat adalah dengan menggunakan poster, pamflet, dan spanduk yang dipasang di tempat-tempat strategis. Seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Burhanuddin bahwa:

“Dalam melakukan sosialisasi terhadap program penanganan anak jalanan kami dari dinas sosial telah menyebarkan informasi kepada masyarakat dengan memasang spanduk, stempel, ataupun brosur yang dibagikan tentang adanya Perda No 2 Tahun 2008” (Wawancara, 17 April 2015)

Hal yang senada pun disampaikan oleh Bapak Haidar selaku kepala seksi dalam penanganan anak jalanan, beliau mengatakan:

“Kami sudah sangat berusaha keras dalam menyampaikan informasi tentang adanya program penanganan anak jalanan, baik secara langsung ataupun lewat media cetak ataupun elektronik” (Wawancara, 16 April 2015)

Walaupun dinas sosial sudah berusaha dalam melakukan sosialisasi program, namun untuk kedepannya diharapkan pihak dinas sosial kota makassar

harus lebih inovatif dalam menyampaikan informasi dan penggunaan media sosialisasi seperti pemanfaatan teknologi informasi yang semakin maju.

Dari hasil wawancara di atas mengenai sosialisasi program yang dilakukan dinas sosial penulis mengambil kesimpulan bahwa dinas sosial sudah berusaha dalam melakukan sosialisasi program penanganan anak jalanan terhadap masyarakat namun pada kenyataannya dengan masih banyaknya masyarakat yang secara Cuma-cuma memberikan sedekahnya kepada para anak jalanan, secara tidak langsung telah menggambarkan ketidaktahuan maupun ketidakyakinan masyarakat terhadap penanganan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar dalam menyelesaikan permasalahan anak jalanan. Hal ini tentu saja sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar belum cukup efektif dalam menangani permasalahan anak jalanan.

V.3.3 Keberhasilan Tujuan Program

Tujuan (*a goal*) merupakan hasil akhir yang ingin dicapai individu ataupun kelompok yang sedang bekerja, atau secara ideal, tujuan merupakan hasil yang diharapkan menurut nilai orang-orang. Tujuan merupakan pedoman dalam pencapaian program dan aktivitas serta memungkinkan untuk terukurnya efektivitas dan efisiensi kelompok. Tujuan program merupakan faktor utama dalam menentukan efektivitas suatu program, yaitu apakah tujuan yang telah direncanakan sesuai atau tidak dalam pelaksanaannya.

Dalam menentukan efektivitas pencapaian tujuan program penanganan anak jalanan di kota Makassar, terdapat dua indikator yang digunakan yaitu membangun jiwa kemandirian bagi anak jalanan dan menumbuhkan kepedulian masyarakat

terhadap anak jalanan. Kedua indikator ini merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Sosial kota Makassar dalam melaksanakan program penanganan anak jalanan.

1. Membangun jiwa kemandirian Anak Jalanan

Istilah kemandirian berasal dari kata mandiri yang berarti berdiri sendiri, yaitu suatu keadaan yang memungkinkan seseorang mengatur dan mengarahkan diri sendiri sesuai dengan tingkat perkembangannya. Darodzat dalam (Yaumi,2008) mengemukakan bahwa kemandirian adalah kecenderungan untuk melakukan sesuatu yang diinginkan tanpa bantuan orang lain, juga dapat mengarahkan kelakuannya tanpa tunduk kepada orang lain.

Dinas Sosial kota Makassar dalam menentukan tujuan program membangun jiwa kemandirian bermaksud untuk menanamkan nilai-nilai kemandirian bagi anak jalanan agar mampu berdiri sendiri dalam menentukan masa depannya termasuk dalam menggantungkan hidupnya tanpa bantuan orang lain.

Salah satu cara membangun jiwa kemandirian bagi anak jalanan adalah dengan memberikan bantuan 1 set perlengkapan buat usaha secara gratis kepada anak jalanan. Biasanya berupa alat-alat perlengkapan bengkel, alat-alat kecantikan (salon), itu semua tergantung dengan bakat yang dimiliki anak-anak. Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh bapak Mas'ud selaku kepala bidang Rahabilitas Sosial:

“Setelah kami memberikan pembinaan, kami menilai anak yang memang betul-betul mempelajari pelatihan keterampilan yang diberikan oleh instruktur, setelah kami menilai kami memberikan bantuan berupa alat sesuai dengan bakat yang anak miliki seperti alat-alat bengkel bagi anak laki-laki dan alat kecantikan bagi anak perempuan” (Wawancara, 5 Mei 2015)

Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh salah satu anak jalanan yang sekarang mulai menjalankan usaha perbengkelan, di daerah barawaja. Igbo Dia mengatakan bahwa:

“Dinas sosial memberikan pelatihan keterampilan kepada kami, lalu memberikan kami alat-alat perbengkelan bagi anak laki-laki dan alat kecantikan bagi anak perempuan” (Wawancara, 7 Mei 2015)

Hal serupa juga dikatakan oleh Saudara Eko yang juga mendapatkan bantuan paket perbengkelan:

“Sekarang saya sudah tidak turun di jalan lagi, karena sudah mendapat bantuan modal usaha dari dinas sosial berupa alat-alat bengkel. Hal ini sangat membantu kebutuhan ekonomi saya” (Wawancara, 7 Mei 2015)

Hal ini juga dikatakan oleh Dede:

“Saya salah satu dari anak yang mendapatkan bantuan paket perbengkelan dari dinas sosia, sekarang saya sudah bisa membuka usaha perbengkelan sendiri walaupun masih kecil-kecilan tapi ini lebih baik daripada harus meminta-minta di jalan” (Wawancara, 21 Mei 2015)

Hal ini di perkuat oleh salah satu anak jalanan yang mendapatkan bantuan paket kecantikan, dia mengatakan:

“Semenjak saya mendapatkan pelatihan dan bantuan modal berupa alat-alat kecantikan, sekarang saya sudah bisa membuka usaha kecil dengan membuka salon dengan peralatan yang sederhana” (Wawancara 10 Mei 2015)

Hal senada juga dikatakan oleh Erna:

“Bantuan yang saya dapatkan dari dinas sosial kota Makassar berupa alat-alat kecantikan, sekarang saya sudah bisa membuka usaha kecil dengan membuka salon, saya diberikan bantuan itu dengan syarat tidak boleh turun lagi ke jalan” (Wawancara, 15 Mei 2015)

Dalam upaya membangun jiwa kemandirian, pihak Dinas Sosial tidak pernah membantu dengan cara memberikan modal berupa uang tunai, sebab hal ini

dikhawatirkan justru menjadikan mereka tidak mandiri dalam berusaha. Hal tersebut diperjelas oleh Bapak Mas'ud:

"Kami tidak pernah memberikan bantuan berupa uang kepada anak jalanan, karena kalau kami memberikan bantuan berupa uang, uang itu akan habis dalam seketika tanpa di pergunakan dengan baik"(Wawancara, 5 Mei 2015)

Hal ini diperkuat dengan pendapat salah satu mantan anak jalanan yang sekarang berprofesi sebagai montir di kecamatan ujung tanah, agus mengatakan:

"Saya mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial dalam bentuk barang, bukan uang. Barang tersebut digunakan untuk membuka usaha perbengkelan saya" (Wawancara, 10 Mei 2015)

Hal senada juga dikatakan oleh, Suri:

"Bantuan yang diberikan oleh dinas sosial berupa alat-alat untuk membuka usaha, kami tidak diberikan bantuan dalam bentuk uang karena kalau kayak begitu uangnya bisa habis dalam sekejap" (Wawancara, 15 Mei 2015)

Sejalan dengan pernyataan di atas, penulis kembali melakukan wawancara terhadap Ria, yang juga mendapatkan bantuan paket kecantikan:

"Dulu saya salah satu anak jalanan yang suka mengamen di pantai, tapi sekarang saya sudah berhenti mengamen karena sudah mendapatkan modal usaha berupa barang-barang kecantikan. Ini sangat membantu kebutuhan sehari-hari saya bagi kami orang-orang kecil" (Wawancara, 23 Mei 2015)

Berdasarkan keterangan di atas, penulis kembali melakukan wawancara dengan salah satu anak yang mendapatkan paket pendidikan, Nurfadillah mengatakan:

"Saya mendapatkan bantuan dari dinas sosial, berupa bantuan paket pendidikan. Saya diberikan peralatan-peralatan buat sekolah jadi orang tua saya tidak perlu membeli lagi" (Wawancara, 03 Juni 2015)

Hal senada juga dikatakan oleh Alam, mantan anak jalanan yang masih duduk di bangku sekolah dasar kelas 5:

“Saya mendapatkan beasiswa di sekolah, dan juga saya mendapatkan bantuan dari dinas sosial” (Wawancara, 03 Juni 2015)

Tabel V.2. Jumlah Anak jalanan yang menerima paket bantuan pada Tahun 2014

No	Paket Bantuan	Jumlah Anak Jalanan
1	Paket Pendidikan	20 Anak
2	Paket Perbengkelan	20 Anak
3	Paket Kecantikan	20 Anak
	Total	60 Anak

Sumber Data : Dinas Sosial Kota Makassar

Dari tabel V.2 diatas menunjukkan bahwa jumlah anak jalanan yang menerima paket bantuan pada tahun 2014 sebanyak 60 anak. Yang terdiri dari 20 anak yang menerima paket pendidikan, 20 anak yang menerima paket perbengkelan, 20 anak yang menerima paket kecantikan.

Berdasarkan data yang di peroleh, penulis melakukan konfirmasi lebih lanjut mengenai jumlah anak jalanan yang memperoleh bantuan kepada Bapak Burhanuddin, Beliau mengatakan:

“Pada tahun 2014 jumlah anak jalanan yang mendapat bantuan hanya 60 anak saja. Hal ini disebabkan karena anggaran yang diberikan dari pusat memang di batasi pertahunnya. Jadi kami dari Dinas Sosial benar-benar melakukan pemantauan kepada anak yang betul-betul bisa menjalankan usahanya kedepan”(Wawancara, 5 Mei 2015)

Pemberian bantuan ini harus sepengetahuan orang tua dari si anak yang memperoleh bantuan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar setiap anak yang mendapat bantuan modal usaha tidak menyalahgunakan modal tersebut untuk hal-hal yang bersifat negatif.

Dari hasil wawancara di atas, penulis menyimpulkan bahwa keberhasilan tujuan program dengan indikator membangun jiwa kemandirian anak jalanan dengan cara memberikan bantuan modal usaha berupa alat-alat sesuai dengan keterampilan dan bakat yang dimiliki anak memang sudah cukup efektif untuk mengurangi jumlah anak jalanan di Makassar.

2. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Efektivitas partisipasi pada dasarnya merupakan suatu hal yang bersifat relativ. Setiap pihak dapat saja memiliki pandangan yang berbeda tentang sampai sejauh mana penanganan anak jalanan ini berjalan dengan baik. Masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam melakukan pembinaan, pencegahan, dan juga rehab terhadap anak jalanan. Karena partisipasi masyarakat juga harus menaati aturan atau sanksi yang sudah jelas ada.

Bentuk kegiatan yang bisa dilakukan masyarakat dalam membina atau mencegah banyaknya jumlah anak jalanan di Kota Makassar, salah satunya yaitu tidak membiasakan memberi uang kepada anak jalanan jelas hal ini sangat riskan terhadap apa yang sudah tertera pada pasal sanksi di Peraturan Daerah No 2 Tahun 2008 tentang anak jalanan yaitu dilarang memberi uang di jalanan. Sebagai masyarakat yang baik hendaknya harus menaati peraturan tersebut agar jumlah anak jalanan bisa di minimalisir dan berkurang sedikit demi sedikit. Hal ini di perjelas oleh kepala bidang Rehabilitas Sosial, Bapak Mas'ud mengatakan bahwa:

“Masyarakat harus menaati hukum dan peraturan yang berlaku. Sebagai warga Negara yang baik dan menaati peraturan yang berlaku harusnya mereka tidak memberi anak-anak uang di jalan, karena nanti akan menjadi kebiasaan bagi anak-anak tersebut. Terlepas dari memberikan uang di jalan, dalam bentuk iba maupun kasihan tidak begini caranya. Ini merupakan cara yang tidak baik dalam membiasakan anak-anak tersebut menerima uang di

jalan, maupun di tempat-tempat keramaian pada umumnya seperti pasar, mall, atau pantai.” (Wawancara, 5 Mei 2015)

Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya sanksi atau larangan memberi uang kepada anak jalanan. Masih banyak masyarakat yang merasa iba kepada anak tersebut dan memberi uang kepada mereka. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Burhanuddin dengan mengatakan:

“Sebagian masyarakat mempunyai kesadaran jika membiasakan memberi uang kepada anak jalanan itu tidak baik namun sebagian masyarakat juga merasa kasihan terhadap anak jalanan akhirnya masyarakat memberikan mereka uang. Dan akhirnya anak yang seharusnya diberi peluang bekerja malah terabaikan karena masyarakat masih memberikan kebiasaan” (Wawancara, 5 Mei 2015)

Dari hasil wawancara di atas, penulis menyimpulkan bahwa keberhasilan tujuan program dengan indikator meningkatkan partisipasi masyarakat belum cukup efektif karena masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui tentang larangan memberi uang kepada anak jalanan, sehingga masyarakat terus memberikan kebiasaan kepada anak jalanan dengan memberi mereka uang.

V.3.4 Pemantauan Program

1. Pemantauan setelah program

Pemantauan kepada anak jalanan setelah program pelatihan dilaksanakan merupakan salah satu langkah dari pihak dinas sosial untuk memastikan apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat terlaksana dengan baik serta untuk memastikan bahwa bantuan berupa alat usaha yang diberikan kepada anak masih berjalan atau tidak.

Pemantauan setelah program atau monitoring biasanya para aparaturnya langsung turun ke tempat-tempat dimana mereka membuka dan mengembangkan usaha mereka sendiri. Dinas sosial kota Makassar yang bekerjasama dengan LSM dan Satpol PP melakukan monitoring tiap bulan setelah mereka sudah di rehab dan di berdayakan. Hal ini di perjelas oleh Bapak Haidar, selaku kepala seksi penanganan anak jalanan dengan mengatakan:

“Setelah melakukan pemberdayaan kepada anak jalanan dengan memberikan bantuan modal usaha berupa peralatan-peralatan, kami biasanya melakukan monitoring dengan mendatangi tempat anak tersebut membuka usaha.” (Wawancara, 5 Mei 2015)

Untuk lebih lanjut, penulis kembali mengkonfirmasi kepada Bapak Burhanuddin, beliau mengatakan:

“Iya, kami memang melakukan monitoring kepada anak-anak jalanan yang sudah di berikan pemberdayaan. Baik untuk anak-anak yang diberikan bantuan beasiswa maupun modal. Kami biasanya langsung turun ke rumah mereka atau tempat usaha mereka untuk memantau apakah mereka sudah tidak turun di jalan lagi atau masih melakukan kegiatan tersebut” (Wawancara, 5 Mei 2015)

Dari penjelasan di atas, penulis melakukan penelusuran lebih lanjut dan melihat data-data mengenai anak-anak yang melanjutkan usaha yang diberikan oleh dinas sosial, penulis mendapatkan informasi bahwa tidak semua anak yang mendapatkan bantuan melanjutkan usaha yang di berikan, sebagian dari mereka melakukan profesi lain. Hal ini di perjelas oleh Bapak Burhanuddin:

“Pada saat kami melakukan monitoring pada anak-anak yang telah mendapatkan bantuan modal, kami melihat bahwa semua anak melanjutkan bantuan usaha yang kami berikan. Sehingga mereka tidak kembali lagi untuk beraktivitas di jalan.”

Dari hasil wawancara di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa pemantauan setelah program yang dilakukan oleh dinas sosial sudah cukup efektif

dengan memantau anak yang diberikan bantuan setelah mereka di berdayakan, agar mereka tidak turun lagi ke jalan.

Setelah melakukan analisis tentang efektivitas program penanganan anak jalanan di kota Makassar dengan cara melakukan penelitian di Dinas Sosial Kota Makassar, dan melakukan wawancara kepada Kepala Bidang Rehabilitas Sosial dan Staff-staffnya, anak jalanan, dan orang tua anak jalanan penulis mengambil kesimpulan bahwa program penanganan anak jalanan yang di lakukan oleh dinas sosial memang belum cukup efektif. Karena masih ada beberapa hambatan yang ditemui di lapangan. Salah satunya kurangnya keterbatasan anggaran yang di berikan oleh pemerintah pusat, hal ini dapat dilihat dari jumlah anak jalanan yang terjaring razia dan jumlah anak jalanan yang mendapatkan paket bantuan sangat jauh berbeda. Hambatan lainnya yaiyu, para pekerja sosial belum mampu meyakinkan masyarakat mengenai pelaksanaan penanganan anak jalanan akibatnya masih banyak masyarakat yang tidak peduli dengan keadaan anak jalanan.

V.4 Faktor-Faktor Pendukung Program Penanganan Anak Jalanan

Sejak ditetapkannya peraturan daerah nomor 2 tahun 2008 tentang pembinaan anak jalanan sebagai landasan hukum yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Makassar dalam hal meminimalisir jumlah anak jalanan yang beroperasi dan beraktivitas di tempat-tempat umum, ada beberapa hal yang mendukung dijalkannya peraturan tersebut. Beberapa diantaranya yaitu :

a. Tersedianya Regulasi (Peraturan Daerah No.2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan data terlampir) sebagai dasar hukum dalam meminimalisir jumlah anak jalanan dengan baik.

Berbicara tentang masalah faktor yang mendukung keinginan pemerintah kota makassar untuk meminimalisir jumlah anak jalanan yang berkeliaran atau yang melakukan aktivitas di jalan maupun di tempat-tempat umum yang ada di kota makassar. Sulitnya mengatasi anak jalanan tersebut tidaklah mudah. Pasalnya sejumlah anak yang terjaring dalam razia yang kemudian dimasukkan dalam tempat tertentu untuk diberikan pembinaan dan keterampilan lainnya, tidak bisa menjamin anak-anak itu tidak akan kembali lagi ke jalan. Pemerintah kota makassar sejak tahun 2008 sudah membuat suatu regulasi atau aturan dalam bentuk peraturan daerah yang mengatur secara khusus tentang pembinaan anak jalanan di kota makassar.

Dimana tujuan utama dari pembuatan aturan tersebut yaitu sebagai alat (dasar hukum) yang dipakai dalam meminimalisir atau mengurangi jumlah anak jalanan di kota makassar dengan cara memberikan pembinaan sebagai mana yang telah di jalaskan pada bagian sebelumnya bahwa anak jalanan yang telah mendapatkan pembinaan tidak lagi berprofesi sebagai anak jalanan yang berkeliaran di tempat-tempat umum, tetapi anak tersebut telah memiliki kemampuan atau *skill* untuk mengembangkan potensi atau bakat yang dia milikinya setelah di berdayakan.

b. Tersedianya sumber daya yang memadai untuk membina anak jalanan di Kota Makassar.

Walaupun isi suatu kebijakan sudah baik dan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsiten, tetapi bila sumber daya kurang memahami dan kurang melaksanakan, implementasi dari suatu kebijakan tidak akan berjalan efektif. Implementasi dari suatu kebijakan memerlukan dukungan baik sumberdaya manusia (*human resources*), maupun sumberdaya non-manusia (*non-human resources*), Karenanya manusia merupakan sumberdaya yang paling penting dalam menjalankan suatu kebijakan. Tanpa sumberdaya kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja. Kinerja dari pegawai maupun aparatur baik dari Dinas Sosial Kota Makassar maupun dari LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), dan Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) juga dirasa dampaknya oleh anak jalanan dan masyarakat sekitar.

V.5 Faktor-Faktor Penghambat Program Penanganan Anak Jalanan

a. Modernisasi, Industrialisasi, Urbanisasi

Kota metropolitan seperti Kota Makassar tidak terlepas dari yang namanya modernisasi, industrialisasi, dan urbanisasi. Ketiga faktor tersebut biasanya merupakan faktor penghambat dari jalannya suatu aturan. Modernisasi menyebabkan laju informasi dan komunikasi kian tahun semakin pesat. Tidak heran orang-orang pada berlomba untuk mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan segera. Modernisasi menyebabkan kehidupan semakin hari kian modern saja. Dampak dari modernisasi menyebabkan kota Makassar menjadi kota dunia dan orang-orang yang dianggap marginal harus terpinggirkan.

Kedua yaitu, industrialisasi yang mengakibatkan pekerjaan kalangan dari usaha kecil menengah semakin tergeser saja. Kemajuan industrialisasi di kota makassar menyebabkan kota ini semakin berkembang, dan masalah pun muncul seiring dengan berkembangnya dunia perindustrian di kota makassar. Selain dua hal tersebut diatas, urbanisasi juga merupakan salah satu faktor penghambat.

Dimana urbanisasi penyebab dari laju pergeseran penduduk dari desa ke kota. Karena semakin banyaknya penduduk yang mengaggap kota merupakan sumber pekerjaan yang layak, maka tidak heran banyak masyarakat desa mencari pekerjaan di kota. Hal ini adalah merupakansalah satu faktor yang mengakibatkan berkembang pesatnya jumlah anak jalanan yang beroperasi atau yang beraktivitas di Kota Makassar akibat modernisasi, industrialisasi serta urbanisasi yang berjalan sangat pesat. Hal tersebut mengakibatkan keadaan kota yang secara langsung mengundang masyarakat miskin semakin tergusur dengan kebodohan akan ketidaktahuan mengenai ketiga hal tersebut diatas.

Kota yang padat akan penduduknya dan masyarakat miskin yang tidak tahu seperti apa ketiga hal tersebut di atas menjadi faktor penyebab banyak keluarga yang bermasalah, adanya anak yang kekurangan gizi, kurang perhatian, kurang pendidikan, kurang kasih sayang dan kehangatan jiwa, serta kehilangan hak untuk bermain, bergembira, bermasyarakat, dan hidup merdeka, atau bahkan mengakibatkan anak-anak dianiaya batin, fisik, dan seksual oleh keluarga, teman, orang lain lebih dewasa.

b. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan faktor utama dari penyebab terjadinya anak jalanan di Kota Makassar. Kemiskinan sendiri identik dengan kebodohan dan rentannya masalah ekonomi tergantung dari garis kemiskinan. Kita ketahui krisis ekonomi yang sedang melanda Indonesia sejak Tahun 1997 yang ditandai dengan terjadinya krisis moneter hingga berlakunya kebijakan menaikkan Bahan Bakar Minyak (BBM) awal maret 2005, mengakibatkan banyak terjadinya peningkatan jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan. Dari data diatas jumlah anak jalanan pada tahun 2007 sebesar 1407 anak jalanan, ketika berlakunya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008, jumlah anak jalanan menurun menjadi 869 anak jalanan, dan meningkat lagi pada tahun-tahun berikutnya, yaitu berkisar 900 lebih anak jalanan. Terjadinya peningkatan jumlah anak tersebut disebabkan faktor kemiskinan ditengah himpitan ekonomi keluarga yang melanda. Masalah kemiskinan memang kerap kali menimpa bangsa Indonesia yang biasa di sebut dengan Negara berkembang. Tidak dipungkiri lagi kemiskinan melekat dengan Negara-negara berkembang termasuk bangsa Indonesia. Kemiskinan identik dengan anak-anak di jalanan, karena mereka tidak mempunyai kehidupan yang layak dan biaya yang tidak dapat mencukupi pada hari itu juga. Pemerintah dari tahun ke tahun sudah mengetahui hal ini, bukan berarti pemerintah tidak bisa ambil tindakan, hanya saja pemerintah tidak cukup kuat mempunyai landasan hukum yang kuat untuk meminimalisir keberadaan anak-anak jalanan yang meresahkan masyarakat di sekitarnya.

“selama ini yang menjadi penghambat kami dalam melakukan meminimalisir jumlah anak jalanan yang berada dan beroperasi di tempat-tempat umum yang ada di Kota Makassar yaitu, masalah kemiskinan yang mengrogoti masyarakat Kota Makassar khususnya masyarakat kalangan

bawah. Inilah yang susah untuk dipecahkan bagaimana cara untuk mengentaskan permasalahan ini.” (Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitas Sosial Dinas Sosial Kota Masyarakat,2015).

c. Kondisi sosial

Fenomena merebaknya anak jalanan di Indonesia merupakan persoalan sosial yang kompleks. Hidup menjadi anak jalanan memang bukan merupakan pilihan yang menyenangkan, karena mereka berada dalam kondisi yang tidak memiliki masa depan yang jelas, dimana keberadaan mereka seringkali menjadi ”masalah” bagi banyak pihak keluarga, masyarakat dan negara. Kondisi keluarga yang kurang menyebabkan banyaknya anak-anak mereka tidak mendapat kehidupan yang layak. Mereka pun turun ke jalan entah itu hanya ikut-ikutan karena pengaruh teman atau untuk mencari rezeki di jalan hanya untuk memiliki uang sendiri. Kondisi keluarga dan lingkungan sangat mempengaruhi anak-anak jalanan tersebut.

Kedua hal itu harusnya menjadi pondasi yang kuat dalam mengarungi kerasnya persaingan di kota Makassar yang semakin hari kian modern saja. Tetapi, tidak untuk anak jalanan, mereka yang beraktivitas di jalanan hanya memikirkan bagaimana mencukupi kebutuhan mereka pada hari itu saja. Namun, perhatian terhadap nasib anak jalanan tampaknya belum begitu besar, padahal mereka adalah saudara kita, mereka juga adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dilindungi, dijamin hak-haknya, sehingga tumbuh-kembang menjadi manusia dewasa yang bermanfaat, beradab dan bermasa depan cerah.

“kondisi lingkungan terutama orang tua ikut berperan dalam menentukan masa depan anak-anaknya. Karena anak-anak melihat apa yang dilakukan orang dewasa, mereka meniru. Seperti yang dilakukan orang tua mereka di jalan, mereka pun ikut melakukannya. Jadi apa yang ditanamkan dalam

prilaku keluarga begitu juga yang dirasakan oleh anak-anaknya. (Hasil Wawancara dengan Staf Rehabilitas Sosial Dinas Sosial Kota Makassar,2015.)

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

VI.1 Kesimpulan

Setelah diuraikannya mengenai bentuk-bentuk pembinaan yang sangat tertata dengan baik dan mempunyai tahapan demi tahapan yang dirasa sangat bagus untuk kehidupan anak-anak jalanan serta orang tua dan/atau wali dari anak-anak jalanan tersebut perlu diketahui bahwa ada beberapa hal yang sangat riskan dan tidak sejalan dengan kenyataan yang ada. Mulai dari ketepatan sasaran program yang terdiri dari 3 indikator ditujukan untuk anak jalanan, orang tua anak jalanan dan masyarakat memang sudah cukup efektif. Karena anak jalanan yang menjadi sasaran dari program penanganan anak jalanan ini diberikan bantuan beasiswa dan paket pendidikan berupa peralatan-peralatan sekolah dan pelatihan keterampilan untuk yang putus sekolah. Sedangkan untuk orangtua anak jalanan sendiri juga diberikan modal usaha untuk memperbaiki kehidupan ekonomi keluarga mereka. Dan untuk masyarakat sendiri, dinas sosial selalu menghimbau kepada masyarakat agar tidak memberi uang kepada anak jalanan agar anak tersebut tidak turun lagi ke jalan untuk meminta-minta.

Sedangkan untuk sosialisasi program yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar baik secara langsung ataupun tidak langsung, masih kurang dirasakan oleh masyarakat. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui tentang adanya kebijakan larangan memberi kepada anak jalanan.

Untuk efektivitas keberhasilan tujuan program yang terdiri dari dua indikator yaitu membangun jiwa kemandirian anak jalanan dan meningkatkan partisipasi

masyarakat. Untuk indikator membangun jiwa kemandirian anak jalanan memang sudah cukup efektif dengan cara memberikan bantuan modal usaha kepada anak jalanan, agar mereka bisa mandiri dan tidak kembali ke jalanan lagi. Sedangkan untuk indikator meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengurangi jumlah anak jalanan di Makassar masih belum efektif karena masih kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk tidak memberi uang kepada anak jalanan.

Untuk efektivitas pemantauan program dimana disini hanya menggunakan satu indikator yaitu pemantauan setelah program dilakukan sebagai langkah untuk memastikan tujuan program dilaksanakan oleh anak jalanan dengan optimal. Hasil yang didapat yaitu dinas sosial melakukan pemantauan kepada anak jalanan setelah mendapatkan bantuan baik berupa beasiswa bagi yang sekolah ataupun modal buat usaha.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar memang belum cukup efektif, karena kenyataannya yang ditemui di lapangan, bukan penurun jumlah anak jalanan melainkan semakin bertambahnya jumlah anak jalanan dari tahun ke tahun. Daftar tabel V.1 di atas merupakan petunjuk faktanya bahwa dari tahun 2007 jumlah anak jalanan mengalami penurunan namun pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 jumlah anak jalanan dari yang berjumlah 869 meningkat menjadi 1043. Mungkin pertambahan dari jumlah anak jalanan ini tidak begitu pesat, tapi kecenderungan implementasi peraturan daerah nomor 2 tahun 2008 tentang pembinaan anak jalanan berjalan tidak sesuai harapan masyarakat Kota Makassar. Hal ini tentu saja sangat bergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penanganan anak jalanan.

Untuk faktor pendukung antara lain, peraturan daerah yang sudah dinilai begitu baik oleh pemerintah belum bisa menangani permasalahan anak jalanan yang dari tahun ke tahun meningkat. Meskipun peningkatannya tidak tajam, tetapi hal ini dikatakan belum optimal penanganannya terhadap pembinaan anak jalanan. Untuk sumber daya manusia, Dinas Sosial Kota Makassar melakukan kerjasama di berbagai pihak untuk meminimalisir anak jalanan sudah berjalan sebagaimana mestinya.

Sedangkan Faktor penghambat antara lain yaitu industrialisasi, modernisasi, dan urbanisasi. Jaman sekarang semua serba canggih jadi, masyarakat dituntut untuk mengikuti perkembangan jaman kalau mereka tidak ingin ketinggalan. Dan hal ini sangat riskan bagi masyarakat marginal karena mereka tidak sepenuhnya tahu akan hal tersebut. Lalu dengan adanya kemiskinan, jelas dengan adanya kemiskinan, dan pengangguran yang tiap tahun semakin tajam peningkatannya, maka tidak heran ada sebagian masyarakat marginal mencari kehidupan mereka di jalanan. Karena kondisi ekonomi dan sosial yang mengharuskan mereka melihat keadaan yang tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai oleh pemerintah. Selain itu kondisi sosial juga ikut berpengaruh Di satu sisi mereka dapat mencari nafkah dan mendapatkan pendapatan (income) yang dapat membuatnya bertahan hidup dan menopang kehidupan keluarganya. Namun di sisi lain kadang mereka juga berbuat hal-hal yang merugikan orang lain, misalnya berkata kotor, mengganggu ketertiban jalan, dll.

VI.2 Saran:

1. Penanggulangan dapat dilakukan yaitu dengan membuat program peningkatan kesadaran masyarakat. Aktivitas program ini untuk menggugah masyarakat agar mulai tergerak dan peduli terhadap masalah anak jalanan. Kegiatan ini dapat berupa penerbitan bulletin, poster, buku-buku, iklan layanan masyarakat di TV, program pekerja anak di radio dan sebagainya.
2. Mengoptimalkan setiap sumber daya yang ada, baik SDM maupun fasilitas lain sehingga program dapat berjalan berkelanjutan.
3. Pemantauan setelah program memang sudah efektif namun harus lebih dioptimalkan lagi dengan menambah jumlah pengurus ataupun relawan yang secara khusus memiliki tugas memonitoring kegiatan anak jalanan setelah mereka mengikuti program pemberdayaan. Sehingga ada pembagian tugas yang jelas antara pengurus yang mengurus keseharian organisasi dengan pengurus yang secara khusus mengurus atau memantau.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2005. *Modul Pelayanan Sosial Anak Jalanan*. Jakarta : Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Departemen Sosial Republik Indonesia.
- Budiani, Ni Wayan. 2007. Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran
- Gibson, dkk. 1984. *Organisasi dan Manajemen Perilaku Struktur Proses*. (Terjemahan : Djoerban Wahid). Jakarta : Penerbit Erlangga
- Gunarsa, Singgih D. 2004. *Dari Anak Sampai Usia Lanjut*. Jakarta : Penerbit Gunung Mulia
- Hadari, Nawawi. 2007. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajahmada University Press
- Hariadi, Sri Santuti & Suryanto, Bagong, 2001. *Anak-Anak Yang Dilanggar Hanya. Potret Sosial Anak Rawan Di Indonesia Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus*, Surabaya, Lutfansah Mediatama
- Joni, Muhammad, et.al. 1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi dan Sosial INPUT*. Volume 2 No. 1
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- Saputra, H. (2008, Desember 21). *Masalah Anak Jalanan [1]*. Available FTP: <http://www.harjasaputra.wordpress.com>.
- Siagian, Sondang P. 1986. *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta : Penerbit Gunung Agung
- Steers, Richard.M. 1985. *Efektivitas Organisasi* (penerjemah Magdalena Jamin). Jakarta : Penerbit Erlangga
- Sugiyono. 1998. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : CV. Alfabeta
- Supartono. 2004. *Bacaan Dasar Pendamping Anak Jalanan*. Semarang: Yayasan Setara
- Sutrisno, Edy. 2010. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Penerbit Kencana
- Suyanto, Bagong. 2010. *Masalah Anak Sosial*. Jakarta : Penerbit Kencana

Suyanto, Bagong. 2003. *Revitalisasi Penanganan Anak Jalanan*. Surabaya : Penerbit Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Kota Surabaya

Tangkilisan, Hessel N.S. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta : Penerbit Grasindo

Tulus, Agus. 1996. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

Dokumen-Dokumen

http://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_daerah

Makalah Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis Kota Makassar, 2011, Mahasiswa Program Kerjasama Ilmu Pemerintahan

Peraturan Daerah Pemerintah Kota Makassar No.2 Thn 2008

L A M P I R A N



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rizcah Amelia

Tempat dan Tanggal Lahir : Dili, 26 April 1993

Alamat : Jl. Kande 3 Lrg 3 No 34

Nomor telepon : 0822 3833 6495

Nama Orang Tua - Ayah : Beddu Solo

- Ibu : Hj. Suleha

Riwayat Pendidikan Formal

SD : YAPIS IBTIDAIYAH QUBA SORONG (1999-2005)

SMP : SMP NEGERI 1 SORONG (2005-2008)

SMA : SMAN NEGERI 3 SORONG (2008-2011)

Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Administrasi (2011-2015)



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS SOSIAL

Jl. A. R. Hakim No. 50 Makassar 90211
Tlp. +62411-448313 Fax +62411-448313

AR SIP

Makassar, 18 Mei 2015

Nomor : 014/633/Dinsos/ V/2015
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi Telah Melaksanakan Penelitian**

Kepada
Yth. Wakil Dekan I FISIP UNHAS Makassar
Di -
Makassar

Dengan Hormat,

Memperhatikan Surat Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Nomor : 070/888-II/BKBP/IV/2015, tanggal 01 April 2015, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa :

Nama : RISCAH AMELIA
Nim / Jurusan : E1111101/ Ilmu Adm. Negara
Instansi/Pekerjaan : Mahasiswa UNHAS
Alamat : Kampus UNHAS Tamalanrea Makassar
Judul : **"EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PENANGANAN ANAK JALANAN DI DINAS SOSIAL KOTA MAKASSAR"**.

Telah mengadakan Penelitian pada Dinas Sosial Kota Makassar Dalam Rangka Penyusunan Skripsi sesuai dengan judul di atas dari tanggal 01 April s/d 16 Mei 2015.

Demikian disampaikan sebagai bahan seperlunya dan copy skripsi dapat diberikan kepada Dinas Sosial Kota Makassar.


KEPALA DINAS
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
DRS. H. MAS'UD. S. MM
Pembina Tk. I
NIP. : 19580313 198503 1 014

Tembusan :

1. Bapak Walikota Makassar (Sebagai Laporan) di Makassar
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar
4. Peringgal.